MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DITJEN BADILMILTUN

PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

TRIWULAN III TAHUN 2026

INTEGRITAS | PROFESIONAL | AKUNTABEL | KOLABORATIF

Jl. Syech Nawawi Albantani No.3
Km.5 Banjarsari, Cipocok Jaya
Serang 42123

www.ptun-serang.go.id

(0254) 214085

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus instrumen pengendalian internal dalam rangka memastikan pelaksanaan Perjanjian Kinerja berjalan sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, perkembangan capaian kinerja organisasi dapat diketahui secara berkala, sehingga kendala dan potensi permasalahan dapat diidentifikasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang tepat.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Triwulan III Tahun 2026, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memanfaatkan aplikasi **MOTOR KINETIS (Monitoring Indikator Kinerja Terintegrasi)** sebagai *tools* atau sarana pengumpulan data kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja. Aplikasi ini digunakan untuk menghimpun data realisasi capaian indikator dari masing-masing penanggung jawab, sekaligus mendokumentasikan eviden pendukung, kendala atau faktor penghambat, serta rencana aksi dan tindak lanjut yang diperlukan. Dengan adanya MOTOR KINETIS, proses pengumpulan informasi kinerja diharapkan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri sebagai bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi.

Pemanfaatan MOTOR KINETIS tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan angka capaian kinerja, tetapi juga mendukung proses evaluasi yang lebih menyeluruh melalui keterkaitan antara realisasi indikator, eviden pendukung, kendala yang dihadapi, dan langkah perbaikan yang direncanakan. Informasi yang dihimpun melalui aplikasi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan analisis capaian kinerja Triwulan III, dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap dokumen eviden dan sumber data terkait. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pencapaian kinerja serta kebutuhan tindak lanjut pada masing-masing indikator.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, mengevaluasi tingkat pencapaian indikator kinerja, mengidentifikasi kendala yang dilaporkan oleh penanggung jawab, serta merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai dasar pengendalian kinerja pada Triwulan IV. Hasil monitoring ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan prioritas perbaikan dan mendorong pencapaian target kinerja secara optimal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan MOTOR KINETIS masih dapat terus dikembangkan, khususnya dalam meningkatkan kelengkapan data, konsistensi pengisian, kualitas eviden pendukung, dan ketepatan penyampaian informasi oleh setiap penanggung jawab indikator. Oleh karena itu, saran,

masukan, dan rekomendasi dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan proses monitoring dan evaluasi serta pengembangan pemanfaatan aplikasi pada periode berikutnya.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Semoga upaya ini dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan secara berkelanjutan.

Serang, 26 Oktober 2026

Ketua Tim Akuntabilitas
PTUN Serang

RETNO NAWANGSIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 3

C. Maksud dan Tujuan 3

D. Ruang Lingkup 4

BAB II GAMBARAN UMUM KINERJA ORGANISASI

A. Sasaran Strategis 6

B. Pendekatan Monitoring dan Evaluasi 7

C. Metode Evaluasi 8

BAB III HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

A. Gambaran Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026.... 11

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepaniteraan 13

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik 21

D. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kesekretariatan 23

E. Evaluasi Ketercapaian Sasaran Kinerja secara Keseluruhan 35

BAB IV ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Analisis Umum Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 40

B. Analisis Kinerja Kepaniteraan 42

C. Analisis Capaian Kinerja Kepuasan dan Kepercayaan Publik 47

D. Analisis Capaian Kinerja Kesekretariatan 50

E. Analisis Risiko dan Pengendalian Kinerja 57

F. Proyeksi Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Tahun 2026 62

BAB V PERMASALAHAN, HAMBATAN, TINDAK LANJUT DAN RENCANA AKSI

A. Permasalahan dan Hambatan 23

B. Upaya Perbaikan dan Pengendalian 23

C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Triwulan II 25

D. Rekomendasi 26

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Rekomendasi 69

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara berkesinambungan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengendalian manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya telah berjalan sesuai sasaran, target, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Memasuki Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan monitoring dan evaluasi memiliki peran strategis dalam menilai perkembangan pencapaian sasaran kinerja sampai dengan akhir September 2026. Periode ini menjadi salah satu tahapan penting untuk mengetahui tingkat ketercapaian target tahunan, mengidentifikasi indikator yang masih memerlukan perhatian, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan sebelum memasuki Triwulan IV. Dengan demikian, hasil monitoring tidak hanya digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja pada periode berjalan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja menjelang akhir tahun anggaran.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memanfaatkan aplikasi MOTOR KINETIS sebagai instrumen pengumpulan dan pemantauan data kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja. Aplikasi ini digunakan untuk menghimpun informasi capaian indikator kinerja dari penanggung jawab masing-masing indikator, termasuk data realisasi, kendala atau faktor penghambat, rencana aksi atau tindak lanjut, serta dokumen eviden pendukung. Melalui mekanisme tersebut, proses monitoring diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi sehingga informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan dapat dihimpun dari sumber yang jelas.

Penggunaan MOTOR KINETIS juga memberikan ruang bagi penanggung jawab indikator untuk menyampaikan kondisi pelaksanaan kinerja secara lebih kontekstual. Data capaian yang disajikan tidak hanya berupa angka realisasi, tetapi dapat dilengkapi dengan penjelasan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, faktor yang memengaruhi pencapaian target, serta langkah yang

direncanakan untuk mengatasi kendala. Ketersediaan informasi tersebut menjadi unsur penting dalam proses evaluasi karena memungkinkan analisis kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan yang dilaporkan oleh unit atau penanggung jawab terkait, bukan semata-mata berdasarkan perbandingan angka target dan realisasi.

Ruang lingkup monitoring Triwulan III mencakup indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, termasuk penyelesaian perkara, kualitas pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan administrasi peradilan, profesionalisme aparatur, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta pelaksanaan dan perencanaan anggaran. Dalam aspek anggaran, evaluasi meliputi antara lain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), dan capaian Rincian Output (RO), sesuai dengan indikator yang dipantau. Informasi dalam MOTOR KINETIS selanjutnya digunakan bersama dokumen eviden dan data dari aplikasi sumber yang relevan untuk mendukung penelaahan terhadap capaian masing-masing indikator.

Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kesinambungan proses monitoring dan evaluasi kinerja. Hasil evaluasi periode sebelumnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menilai perkembangan kinerja pada Triwulan III, sedangkan kendala dan rencana aksi yang tercatat dalam MOTOR KINETIS menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut. Dalam hal terdapat indikator yang belum mencapai target, analisis dilakukan dengan memperhatikan data yang tersedia, keterangan penanggung jawab, dan eviden pendukung. Apabila informasi mengenai kendala atau rencana aksi belum tersedia secara memadai, kondisi tersebut perlu dicatat sebagai bagian dari hasil monitoring agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab.

Melalui penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2026, diharapkan diperoleh gambaran yang objektif mengenai perkembangan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan akhir September 2026. Laporan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi bagi pimpinan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, mengarahkan tindak lanjut atas indikator yang belum optimal, serta memastikan bahwa langkah perbaikan dilaksanakan secara terukur dalam rangka mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja pada akhir Tahun 2026.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan dan dokumen perencanaan kinerja sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur organisasi dan tata kerja kepaniteraan serta kesekretariatan pengadilan.
8. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025–2029.
9. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2026.
10. Dokumen dan ketentuan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pengendalian capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
11. Data capaian kinerja, kendala, rencana aksi, dan eviden pendukung yang dihimpun melalui aplikasi MOTOR KINETIS serta dokumen atau aplikasi sumber terkait.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas perkembangan pencapaian Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan III Tahun 2026 melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis data kinerja yang dihimpun menggunakan aplikasi MOTOR KINETIS serta didukung oleh dokumen dan aplikasi sumber yang relevan. Laporan ini diharapkan menjadi instrumen pengendalian kinerja bagi pimpinan dalam memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sampai dengan akhir Triwulan III.
2. Menilai perkembangan realisasi kinerja pada unsur kepaniteraan dan kesekretariatan berdasarkan data yang tercatat dalam MOTOR KINETIS dan eviden pendukung.
3. Mengidentifikasi kendala, faktor penghambat, serta kondisi yang memengaruhi pencapaian indikator kinerja berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab indikator.
4. Menelaah kesesuaian antara capaian kinerja, keterangan pendukung, dan dokumen eviden yang tersedia.
5. Mengevaluasi tindak lanjut dan rencana aksi atas indikator yang belum mencapai target atau masih memerlukan peningkatan.
6. Menilai perkembangan pelaksanaan anggaran dan indikator pendukung kinerja organisasi, termasuk IKPA, NKPA, serta capaian RO sesuai dengan data yang tersedia.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan MOTOR KINETIS sebagai instrumen pengumpulan data, dokumentasi eviden, dan pemantauan tindak lanjut kinerja.
8. Merumuskan rekomendasi perbaikan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan capaian kinerja pada Triwulan IV serta pencapaian target akhir Tahun 2026.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi dalam laporan ini meliputi:

1. **Monitoring capaian Perjanjian Kinerja**, mencakup indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unsur kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. **Pengumpulan dan penelaahan data melalui MOTOR KINETIS**, meliputi realisasi indikator, keterangan kendala atau faktor penghambat, rencana aksi atau tindak lanjut, serta eviden yang disampaikan oleh penanggung jawab indikator.
3. **Evaluasi kinerja kepaniteraan**, meliputi indikator penyelesaian perkara, penyampaian salinan putusan, pemberitahuan putusan, publikasi putusan, penyelesaian permohonan eksekusi, dan pemanfaatan e-Court sesuai dengan indikator dalam Perjanjian Kinerja.
4. **Evaluasi kualitas pelayanan publik**, meliputi capaian indikator kepuasan dan kepercayaan masyarakat serta hasil survei yang menjadi dokumen pendukung.

5. **Evaluasi kinerja kesekretariatan**, meliputi indikator profesionalisme aparatur, pengelolaan anggaran, perencanaan anggaran, pengelolaan BMN, serta indikator pendukung lainnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
6. **Evaluasi pelaksanaan anggaran**, meliputi IKPA, NKPA, capaian Rincian Output, penggunaan SBK, dan komponen penilaian terkait berdasarkan data yang tersedia pada periode monitoring.
7. **Penelaahan kendala dan tindak lanjut**, yaitu mengidentifikasi indikator yang belum mencapai target, menelaah penjelasan penanggung jawab, serta memantau rencana aksi yang tercatat dalam MOTOR KINETIS.
8. **Analisis risiko dan kebutuhan pengendalian kinerja**, terutama terhadap indikator yang berpotensi tidak mencapai target tahunan atau membutuhkan percepatan tindak lanjut pada Triwulan IV.
9. **Penyusunan rekomendasi perbaikan**, sebagai bahan arahan pimpinan dan tindak lanjut oleh unit atau penanggung jawab indikator dalam rangka mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KINERJA ORGANISASI

A. Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan badan peradilan yang agung melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan, pelayanan publik yang prima, profesionalisme aparatur, serta tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut dijabarkan dalam sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2026.

Sasaran strategis tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang memuat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Indikator yang dipantau mencakup aspek penyelesaian perkara, ketepatan waktu penyampaian dokumen dan informasi putusan, penyelesaian permohonan eksekusi, pemanfaatan layanan peradilan elektronik, kepuasan masyarakat, profesionalisme aparatur, serta kualitas pengelolaan dan perencanaan anggaran. Keseluruhan indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai kontribusi unsur kepaniteraan dan kesekretariatan terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Pada Triwulan III Tahun 2026, monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator sampai dengan akhir September 2026. Hasil monitoring digunakan untuk membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan, melihat perkembangan capaian selama periode berjalan, serta mengidentifikasi indikator yang memerlukan perhatian khusus. Pemantauan juga mempertimbangkan karakteristik masing-masing indikator, termasuk indikator yang dapat diukur setiap bulan, indikator yang dinilai secara triwulanan, dan indikator yang pencapaian finalnya baru dapat ditentukan pada akhir tahun anggaran.

Untuk mendukung proses tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan MOTOR KINETIS sebagai instrumen pengumpulan dan pemantauan data kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja. Melalui aplikasi ini, penanggung jawab indikator menyampaikan data realisasi, melengkapi keterangan kendala, mencatat rencana aksi atau tindak lanjut, dan mengunggah eviden pendukung sesuai kebutuhan indikator. Data yang terkumpul menjadi bahan utama dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap dokumen pendukung dan aplikasi sumber yang relevan.

Dengan mekanisme tersebut, pemantauan sasaran strategis tidak hanya diarahkan untuk mengetahui nilai capaian indikator, tetapi juga untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pelaksanaan kinerja dan tindak lanjut yang diperlukan. Informasi tersebut membantu pimpinan dalam menentukan prioritas pengendalian, memberikan arahan kepada penanggung jawab indikator, serta mengupayakan peningkatan capaian kinerja pada Triwulan IV dan akhir Tahun 2026.

B. Pendekatan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan III dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dengan menempatkan MOTOR KINETIS sebagai instrumen utama pengumpulan informasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi mengenai capaian indikator, kendala, rencana aksi, dan eviden pendukung dapat dihimpun secara sistematis sebagai dasar analisis kinerja organisasi.

Pelaksanaan monitoring dimulai dengan pengisian data oleh penanggung jawab masing-masing indikator sesuai periode pengukuran dan mekanisme yang berlaku dalam aplikasi. Data yang disampaikan mencakup nilai realisasi atau capaian indikator, dokumen eviden pendukung, serta keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan kondisi pelaksanaan kinerja. Apabila indikator belum mencapai target, penanggung jawab dapat mencantumkan kendala atau faktor penghambat beserta rencana aksi yang diperlukan sebagai langkah perbaikan.

MOTOR KINETIS juga berfungsi sebagai media dokumentasi tindak lanjut kinerja. Informasi mengenai kendala dan rencana aksi memberikan konteks bagi pimpinan dalam memahami penyebab capaian yang belum optimal serta langkah yang direncanakan oleh unit terkait. Dengan demikian, monitoring tidak hanya berorientasi pada hasil pengukuran, tetapi juga memperhatikan upaya perbaikan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target. Kelengkapan informasi dalam aplikasi menjadi bagian penting dari proses evaluasi karena memengaruhi kedalaman analisis dan ketepatan rekomendasi yang dapat dirumuskan.

Selanjutnya, data yang telah dihimpun melalui MOTOR KINETIS ditelaah dengan memperhatikan dokumen eviden dan sumber data yang relevan. Untuk indikator tertentu, penelaahan dapat didukung oleh aplikasi atau dokumen sumber, seperti SIPP, SAKTI, OM-SPAN, aplikasi Monev DJA/SMART, laporan survei kepuasan masyarakat, serta dokumen pengelolaan BMN, sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Penggunaan sumber pendukung tersebut

bertujuan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan memiliki dasar yang dapat ditelusuri dan tidak hanya bergantung pada angka yang ditampilkan dalam aplikasi monitoring.

Dalam proses evaluasi, perhatian diberikan pada kesesuaian antara target, realisasi, eviden, dan penjelasan yang disampaikan penanggung jawab. Apabila terdapat indikator yang belum optimal, analisis dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia. Apabila kendala atau rencana aksi belum dicantumkan secara memadai, kondisi tersebut menjadi catatan monitoring untuk ditindaklanjuti oleh penanggung jawab, tanpa menetapkan penyebab yang belum didukung oleh data.

Pendekatan ini juga memperhatikan perbedaan karakteristik waktu pencapaian indikator. Capaian yang masih berkembang pada Triwulan III tidak serta-merta diperlakukan sebagai kegagalan pencapaian target tahunan apabila indikator tersebut memang masih dalam proses pelaksanaan dan pengukurannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, indikator yang menunjukkan potensi tidak tercapainya target perlu memperoleh perhatian lebih awal melalui pemantauan berkala, penelaahan kendala, dan pelaksanaan rencana aksi yang terukur.

Melalui pendekatan tersebut, MOTOR KINETIS diharapkan dapat memperkuat keterpaduan proses pengumpulan data, dokumentasi eviden, analisis capaian, dan pemantauan tindak lanjut. Hasilnya menjadi bahan bagi pimpinan dalam melakukan pengendalian kinerja secara lebih terarah pada Triwulan IV Tahun 2026.

C. Metode Evaluasi

Evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2026 menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan realisasi capaian sampai dengan akhir September 2026, kemudian menganalisis kondisi yang memengaruhi pencapaian indikator berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam metode ini, MOTOR KINETIS digunakan sebagai sumber utama pengumpulan data monitoring, sedangkan dokumen eviden dan aplikasi sumber terkait digunakan untuk mendukung penelaahan sesuai kebutuhan masing-masing indikator.

Metode evaluasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Kinerja

   Pengumpulan data dilakukan melalui MOTOR KINETIS dengan menghimpun realisasi capaian setiap indikator Perjanjian Kinerja, keterangan kendala atau faktor penghambat, rencana aksi atau tindak lanjut, serta eviden yang disampaikan oleh penanggung jawab indikator. Data yang dikumpulkan mencakup indikator pada unsur kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai ruang lingkup monitoring Triwulan III.

2. Penelaahan dan Verifikasi Data

   Data yang telah dihimpun ditelaah dengan memperhatikan kesesuaian antara nilai capaian, periode pengukuran, eviden pendukung, dan sumber data yang relevan. Verifikasi dilakukan sesuai karakteristik indikator, antara lain dengan membandingkan informasi dalam MOTOR KINETIS dengan dokumen atau aplikasi sumber yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja. Apabila terdapat informasi yang belum lengkap atau memerlukan penjelasan, hal tersebut dicatat sebagai kebutuhan klarifikasi atau tindak lanjut.

3. Perbandingan Target dan Realisasi

   Realisasi indikator sampai dengan akhir Triwulan III dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian indikator, perkembangan capaian selama periode pengukuran, serta indikator yang telah mencapai target atau masih memerlukan peningkatan. Interpretasi hasil perbandingan tetap mempertimbangkan karakteristik indikator dan ketentuan waktu pengukurannya.

4. Analisis Kendala dan Faktor yang Memengaruhi Kinerja

   Analisis dilakukan berdasarkan keterangan kendala atau faktor penghambat yang tercatat dalam MOTOR KINETIS, dokumen pendukung, serta informasi relevan dari penanggung jawab indikator. Analisis tidak menetapkan penyebab yang tidak didukung oleh data. Apabila penanggung jawab belum menyampaikan kendala atau rencana aksi, kondisi tersebut dicatat sebagai kekurangan informasi yang perlu dilengkapi dalam proses monitoring.

5. Penelaahan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Rencana aksi yang tercatat dalam MOTOR KINETIS ditelaah untuk mengetahui relevansinya terhadap kendala dan capaian indikator. Penelaahan juga diarahkan pada kebutuhan tindak lanjut yang harus dilakukan pada Triwulan IV, terutama bagi indikator yang belum mencapai target atau berpotensi memengaruhi pencapaian kinerja akhir tahun. Hasil penelaahan menjadi bahan arahan kepada penanggung jawab indikator dan pimpinan dalam menentukan langkah perbaikan.

6. Analisis dan Penyusunan Rekomendasi

Hasil pengumpulan, verifikasi, perbandingan, dan penelaahan data disusun menjadi analisis capaian kinerja organisasi. Berdasarkan hasil tersebut, dirumuskan rekomendasi yang berorientasi pada perbaikan capaian indikator, penyelesaian kendala, kelengkapan eviden, peningkatan kualitas pengisian MOTOR KINETIS, serta penguatan pengendalian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2026.

Melalui tahapan tersebut, hasil evaluasi diharapkan memberikan gambaran yang terukur mengenai perkembangan pencapaian Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2026. Selain menunjukkan posisi capaian indikator, laporan ini juga menyajikan informasi mengenai kendala yang dilaporkan, tindak lanjut yang direncanakan, dan kebutuhan pengendalian yang masih harus diperhatikan. Dengan demikian, hasil monitoring dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

BAB III
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

A. Gambaran Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2026 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja selama periode Juli sampai dengan September 2026. Evaluasi ini mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi kepaniteraan, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pelayanan pengadilan, serta kinerja kesekretariatan yang meliputi profesionalitas aparatur, pelaksanaan anggaran, kinerja perencanaan anggaran, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan Formulir Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2026, hasil monitoring menunjukkan bahwa capaian kinerja satuan kerja memperlihatkan kondisi yang beragam. Pada bidang kepaniteraan, sebagian besar indikator pelayanan administrasi perkara menunjukkan realisasi bulanan sebesar 100%. Namun, indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mengalami variasi realisasi, yaitu sebesar 100% pada Juli, 50% pada Agustus, dan kembali menjadi 100% pada September. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap konsistensi penyelesaian perkara, meskipun pada September realisasi kembali mencapai 100%.

Pada aspek kepuasan dan kepercayaan publik, indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan tercatat memiliki rata-rata realisasi sebesar 99,09, dengan capaian terhadap target sebesar 101,11%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator kepuasan pengguna layanan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini perlu dipertahankan melalui konsistensi pelaksanaan standar pelayanan, penguatan integritas aparatur, dan tindak lanjut terhadap masukan pengguna layanan.

Sementara itu, pada bidang kesekretariatan, indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-01 telah melampaui target. IP ASN mencapai 83,02 dari target 81, sedangkan IKPA DIPA-01 mencapai 98,53 dari target 96. Di sisi lain, IKPA DIPA-05 mencapai 89,29 dari target 95, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA-01 mencapai 81,25 dari target 96, NKPA DIPA-05 mencapai 41,19 dari target 91, dan Indikator Pengelolaan Aset (IPA) mencapai 2,67 dari target 3. Dengan demikian,

beberapa indikator kesekretariatan masih memerlukan perhatian dan pengendalian yang lebih intensif pada Triwulan IV.

Secara keseluruhan, hasil monitoring Triwulan III menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan kinerja. Indikator yang telah memenuhi atau melampaui target perlu dijaga konsistensinya, sedangkan indikator yang belum mencapai target perlu dianalisis berdasarkan komponen penilaian, realisasi kegiatan, dokumen pendukung, dan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh satuan kerja.

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepaniteraan

1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Target kinerja: 91%

Indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan pelayanan peradilan. Indikator ini tidak hanya menggambarkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam memastikan penyelesaian perkara sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan

Berdasarkan formulir monitoring realisasi kinerja kepaniteraan Triwulan III Tahun 2026, realisasi indikator tersebut menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama periode Juli sampai dengan September, sebagaimana berikut.

Bulan	Realisasi	Keterangan
Juli 2026	100%	Target bulanan tercapai
Agustus 2026	50%	Terjadi penurunan realisasi
September 2026	100%	Realisasi kembali mencapai 100%
Rata-rata Triwulan III	83,33%	Di bawah target indikator 91%
Capaian terhadap target	91,58%	Belum mencapai 100% dari target

Pada data tersebut, realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Juli dan September telah mencapai 100%. Namun, pada Agustus realisasi turun menjadi 50%, sehingga rata-rata realisasi selama Triwulan III menjadi 83,33%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 91%, terdapat selisih sebesar 7,67 poin persentase antara rata-rata realisasi dan target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pemantauan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2026 melalui aplikasi MOTOR KINETIS, indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu menunjukkan bahwa capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target berdasarkan rata-rata realisasi periode pengukuran. Kondisi tersebut perlu dianalisis dengan mempertimbangkan data capaian bulanan serta penjelasan kendala yang telah disampaikan oleh unit terkait melalui aplikasi MOTOR KINETIS.

Berdasarkan penjelasan unit terkait, salah satu perkara yang menjadi perhatian dalam evaluasi adalah Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN-SRG. Perkara tersebut telah diserahkan kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diputus sejak tanggal 26 Februari 2026. Dalam proses penanganannya, terdapat sejumlah tahapan persidangan yang perlu dilaksanakan, antara lain proses pemanggilan pihak tergugat, pemeriksaan permohonan intervensi, pemeriksaan pembuktian, pelaksanaan pemeriksaan setempat, serta pemberian kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas dan menyusun kesimpulan.

Dalam perkembangannya, pihak tergugat mengajukan permohonan intervensi yang kemudian ditetapkan melalui penetapan majelis hakim tanggal 29 April 2026. Selain itu, pada tahap pembuktian terdapat permohonan pemeriksaan setempat yang beberapa kali diajukan. Berdasarkan keterangan unit terkait, pemeriksaan setempat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026 dengan mempertimbangkan permohonan para pihak dan kebutuhan penyelesaian proses pembuktian. Selanjutnya, pada tahap pembuktian terakhir, para pihak menyampaikan kebutuhan waktu tambahan untuk memeriksa berkas dan menyusun kesimpulan, sehingga majelis hakim memberikan tambahan waktu dan menjadwalkan persidangan berikutnya pada tanggal 28 Juli 2026.

Rangkaian proses tersebut memberikan konteks faktual bagi evaluasi penyelesaian perkara secara tepat waktu. Penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan, tetapi juga perlu memperhatikan dinamika persidangan, pemenuhan hak para pihak, kebutuhan pembuktian, serta pertimbangan majelis hakim dalam mengelola jalannya persidangan. Meskipun demikian, penjelasan tersebut perlu ditempatkan sebagai faktor yang perlu dianalisis dalam kaitannya dengan pencapaian indikator, dan bukan sebagai dasar untuk langsung menyimpulkan bahwa seluruh kesenjangan capaian disebabkan oleh faktor eksternal atau berada di luar kendali satuan kerja.

Dari perspektif akuntabilitas kinerja, informasi kendala yang dicatat dalam MOTOR KINETIS menunjukkan pentingnya menghubungkan data kuantitatif dengan penjelasan operasional dari unit penanggung jawab. Dashboard tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan angka realisasi, tetapi juga menjadi media dokumentasi kendala dan rencana aksi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pimpinan. Dengan mekanisme tersebut, hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat ditelusuri lebih lanjut berdasarkan kondisi pelaksanaan tugas yang sebenarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi indikator ini perlu diarahkan pada pemeriksaan kesesuaian data perkara yang menjadi dasar penghitungan, ketepatan periode pengukuran, serta hubungan antara tahapan penanganan perkara dan realisasi penyelesaian tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap perkara yang masih berjalan, identifikasi potensi risiko keterlambatan, dan penguatan koordinasi dengan unit terkait agar perkembangan penanganan perkara dapat diketahui secara berkala.

Dengan demikian, capaian indikator penyelesaian perkara secara tepat waktu perlu dievaluasi secara proporsional dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan penjelasan kendala yang telah didokumentasikan melalui MOTOR KINETIS. Tindak lanjut diarahkan pada penguatan pemantauan perkara, ketertiban dokumentasi perkembangan penanganan perkara, serta evaluasi berkala terhadap pencapaian target, dengan tetap memperhatikan kewenangan majelis hakim dalam mengelola dan memutus perkara.

2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak

Target kinerja: 100%

Indikator ini mengukur ketepatan waktu penyediaan dan pengiriman salinan putusan kepada para pihak setelah putusan tersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu penyampaian salinan putusan merupakan bagian penting dari kepastian pelayanan peradilan karena berkaitan dengan pemenuhan hak para pihak untuk memperoleh dokumen putusan.

Berdasarkan hasil monitoring Triwulan III Tahun 2026, realisasi indikator penyediaan atau pengiriman salinan putusan tepat waktu mencapai 100% pada Juli, Agustus, dan September. Dengan demikian, realisasi selama tiga bulan tersebut konsisten memenuhi target yang telah ditetapkan.

Bulan	Realisasi	Status terhadap target
Juli 2026	100%	Tercapai
Agustus 2026	100%	Tercapai
September 2026	100%	Tercapai
Rata-rata Triwulan III	100%	Tercapai

Data tersebut memperlihatkan bahwa seluruh salinan putusan yang menjadi objek pengukuran dalam periode pelaporan tercatat tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu. Konsistensi ini merupakan capaian positif yang perlu dipertahankan karena mendukung transparansi, kepastian prosedur, dan kualitas pelayanan administrasi perkara.

Meskipun demikian, pencapaian 100% tetap perlu didukung oleh tertib administrasi dan bukti pelaksanaan yang dapat diverifikasi. Pengendalian tidak seharusnya berhenti pada pencatatan persentase, tetapi juga memastikan kesesuaian antara jumlah putusan yang diproses, jumlah salinan yang tersedia atau dikirimkan, serta bukti tanggal penyampaian kepada para pihak.

Pemantauan berkala perlu dilanjutkan untuk mencegah keterlambatan pada periode berikutnya, terutama ketika terdapat peningkatan volume perkara atau perubahan beban kerja kepaniteraan. Verifikasi terhadap data sumber juga diperlukan agar capaian yang dilaporkan benar-benar mencerminkan pelaksanaan pelayanan.

Kesimpulan evaluasi: indikator penyediaan atau pengiriman salinan putusan tepat waktu telah mencapai target 100% secara konsisten selama Triwulan III. Capaian ini perlu dipertahankan melalui pengawasan administrasi perkara, pencatatan waktu penyampaian yang tertib, dan verifikasi berkala terhadap dokumen pendukung.

3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

Target kinerja: 100%

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak oleh pengadilan pengaju. Pelaksanaan indikator tersebut berhubungan dengan kelancaran administrasi perkara lanjutan dan pemenuhan

hak para pihak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan maupun hasil pemeriksaan perkara.

Berdasarkan formulir monitoring kepaniteraan Triwulan III Tahun 2026, realisasi indikator ini tercatat sebesar 100% pada Juli, Agustus, dan September. Data jumlah putusan yang diterima pengadilan pengaju dan jumlah pemberitahuan yang disampaikan tepat waktu juga menunjukkan kesesuaian pada setiap bulan yang dilaporkan.

Bulan	Jumlah putusan diterima	Pemberitahuan tepat waktu	Realisasi
Juli 2026	2	2	100%
Agustus 2026	5	5	100%
September 2026	12	12	100%

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah petikan atau amar putusan yang diterima pengadilan pengaju meningkat dari 2 pada Juli menjadi 5 pada Agustus dan 12 pada September. Pada setiap bulan tersebut, jumlah pemberitahuan yang disampaikan tepat waktu sama dengan jumlah putusan yang diterima, sehingga persentase realisasi tetap berada pada 100%.

Dari sisi evaluasi, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dokumen yang harus ditindaklanjuti selama periode pelaporan tidak disertai penurunan persentase ketepatan waktu. Hal tersebut merupakan capaian positif dalam pengelolaan administrasi perkara. Namun, kenaikan jumlah putusan yang diterima juga perlu menjadi perhatian agar proses pencatatan, penerusan informasi, dan penyampaian pemberitahuan tetap terkendali apabila volume perkara meningkat pada periode berikutnya.

Upaya pemeliharaan kinerja perlu dilakukan melalui pencatatan tanggal penerimaan putusan, pemantauan batas waktu pemberitahuan, dan pemeriksaan bukti penyampaian kepada para pihak. Langkah tersebut akan membantu memastikan bahwa capaian yang dilaporkan memiliki dasar administrasi yang memadai.

Kesimpulan evaluasi: indikator pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali telah mencapai target 100% selama Triwulan III. Capaian tersebut perlu dipertahankan dengan

memperkuat pengendalian administrasi dan memastikan seluruh pemberitahuan terdokumentasi secara akurat.

4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Target kinerja: 100%

Indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan digunakan untuk mengukur keterbukaan informasi putusan melalui sarana publikasi resmi. Ketepatan dan kelengkapan unggah putusan merupakan bagian dari upaya mewujudkan transparansi peradilan dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil monitoring Triwulan III menunjukkan bahwa realisasi indikator ini mencapai 100% pada Juli, Agustus, dan September.

Bulan	Putusan yang telah diminutasi	Putusan yang diunggah	Realisasi
Juli 2026	6	6	100%
Agustus 2026	2	2	100%
September 2026	3	3	100%

Berdasarkan data tersebut, seluruh putusan yang telah diminutasi pada setiap bulan yang dilaporkan tercatat telah diunggah pada Direktori Putusan. Hal ini menunjukkan bahwa proses publikasi putusan telah berjalan sesuai dengan target indikator selama periode evaluasi.

Walaupun realisasi telah mencapai 100%, kualitas pengelolaan Direktori Putusan tetap perlu diperhatikan. Keberhasilan indikator bukan hanya bergantung pada persentase unggah, melainkan juga pada ketepatan dokumen yang dipublikasikan, kelengkapan informasi yang diwajibkan, serta kesesuaian antara data pada aplikasi administrasi perkara dan dokumen yang tersedia pada Direktori Putusan.

Oleh karena itu, perlu dilanjutkan pemeriksaan berkala terhadap kesesuaian jumlah putusan yang telah diminutasi dengan jumlah putusan yang diunggah. Pemeriksaan tersebut juga perlu memastikan bahwa tidak terdapat putusan yang tertinggal dalam proses publikasi atau kesalahan administrasi yang memerlukan perbaikan.

Kesimpulan evaluasi: indikator unggah putusan pada Direktori Putusan telah memenuhi target 100% selama Triwulan III. Capaian ini perlu dipertahankan

melalui verifikasi berkala, ketertiban administrasi, dan pengawasan atas kelengkapan serta kesesuaian dokumen yang dipublikasikan.

5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Target kinerja: 90%

Indikator penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara mengukur pelaksanaan tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang masuk dan menjadi kewenangan pengadilan untuk ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator ini memiliki karakteristik berbeda dibandingkan indikator lain karena realisasinya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya permohonan eksekusi pada periode tertentu.

Berdasarkan formulir monitoring Triwulan III Tahun 2026, data indikator ini adalah sebagai berikut.

Bulan	Permohonan eksekusi	Permohonan yang diselesaikan	Realisasi
Juli 2026	n/a	n/a	n/a
Agustus 2026	1	1	100%
September 2026	n/a	n/a	n/a

Pada Agustus 2026, terdapat satu permohonan eksekusi yang tercatat dan permohonan tersebut diselesaikan, sehingga realisasi indikator mencapai 100%. Sementara itu, pada Juli dan September, formulir mencantumkan keterangan n/a. Dengan demikian, pada kedua bulan tersebut tidak terdapat nilai realisasi yang dapat dibandingkan secara langsung dengan target karena tidak tersedia data permohonan yang menjadi dasar penghitungan.

Kondisi tersebut perlu dipahami secara tepat dalam laporan akuntabilitas. Keterangan *n/a* tidak serta-merta menunjukkan kegagalan pencapaian kinerja. Penilaian terhadap indikator ini harus mempertimbangkan keberadaan permohonan eksekusi yang masuk, status penanganannya, serta kesesuaian penyelesaian dengan ketentuan yang berlaku.

Pada saat yang sama, satu realisasi 100% pada Agustus juga tidak dapat diartikan bahwa seluruh kebutuhan eksekusi selama satu triwulan telah selesai apabila terdapat permohonan yang masih berjalan atau belum menjadi objek pengukuran. Karena itu, pemantauan tetap perlu dilakukan terhadap setiap

permohonan yang masuk, termasuk status penyelesaian dan dokumentasi tindak lanjutnya.

Kesimpulan evaluasi: pada Agustus, satu permohonan eksekusi yang tercatat telah diselesaikan dengan realisasi 100%. Adapun realisasi Juli dan September berstatus n/a. Pengendalian selanjutnya perlu memastikan bahwa setiap permohonan yang masuk dicatat, ditindaklanjuti, dan dievaluasi sesuai ketentuan, tanpa menafsirkan bulan tanpa permohonan sebagai kegagalan kinerja.

6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Target kinerja: 100%

Indikator penggunaan e-Court mengukur tingkat pemanfaatan layanan administrasi perkara secara elektronik pada perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menjadi objek pengukuran. Penggunaan e-Court merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi peradilan, peningkatan efisiensi proses, serta penguatan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil monitoring Triwulan III Tahun 2026, realisasi indikator penggunaan e-Court tercatat sebesar 100% pada Juli, Agustus, dan September.

Bulan	Jumlah perkara yang diajukan	Jumlah perkara menggunakan e-Court	Realisasi
Juli 2026	12	12	100%
Agustus 2026	7	7	100%
September 2026	6	6	100%

Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh perkara yang menjadi objek pengukuran pada ketiga bulan tersebut tercatat menggunakan e-Court. Jumlah perkara yang diajukan berubah dari 12 pada Juli menjadi 7 pada Agustus dan 6 pada September, tetapi persentase penggunaan e-Court tetap mencapai 100%.

Dari sisi evaluasi, konsistensi realisasi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan e-Court telah berjalan sesuai dengan target indikator selama periode yang dilaporkan. Walaupun demikian, pemeliharaan kinerja tetap memerlukan pengawasan atas ketepatan pencatatan perkara, kesesuaian data pada sistem, dan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan layanan elektronik.

Pengendalian juga perlu memastikan bahwa setiap perkara yang masuk dalam cakupan pengukuran telah dicatat secara benar, sehingga persentase penggunaan e-Court mencerminkan kondisi aktual. Dengan demikian, capaian yang baik tidak hanya dipertahankan secara kuantitatif, tetapi juga didukung oleh keandalan data administrasi perkara.

Kesimpulan evaluasi: indikator penggunaan e-Court telah mencapai target 100% selama Triwulan III. Capaian ini perlu dipertahankan melalui pemantauan penggunaan sistem, validasi data perkara, dan penguatan koordinasi antara petugas administrasi perkara dengan pengelola sistem informasi.

7. Evaluasi Keseluruhan Sasaran Kinerja Kepaniteraan

Berdasarkan rekapitulasi pada formulir capaian kinerja Triwulan III, capaian Sasaran Kinerja 1, yaitu Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern, tercatat sebesar 100,45%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara agregat sasaran kinerja kepaniteraan berada sedikit di atas target agregat yang ditetapkan dalam formulir.

Namun, capaian agregat tersebut perlu dibaca bersama-sama dengan realisasi masing-masing indikator. Empat indikator layanan administrasi perkara, pengiriman salinan putusan, pemberitahuan petikan atau amar putusan, unggah putusan, dan penggunaan e-Court secara konsisten mencapai 100%. Indikator penyelesaian permohonan eksekusi juga mencatat realisasi 100% pada bulan ketika terdapat permohonan yang menjadi objek pengukuran.

Di sisi lain, indikator penyelesaian perkara tepat waktu memiliki rata-rata realisasi 83,33%, lebih rendah daripada target 91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai agregat yang telah mencapai 100,45% tidak berarti seluruh indikator dalam sasaran tersebut telah sepenuhnya optimal.

Oleh karena itu, evaluasi kepaniteraan pada Triwulan IV perlu diarahkan pada dua fokus utama. Pertama, mempertahankan indikator yang telah mencapai target melalui konsistensi administrasi dan pengawasan. Kedua, memperbaiki indikator penyelesaian perkara tepat waktu melalui telaah terhadap data perkara, pemantauan berkala, dan identifikasi penyebab variasi realisasi.

Dengan pendekatan tersebut, upaya peningkatan kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai agregat, tetapi juga pada pemerataan kualitas

kinerja seluruh indikator yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas pelayanan peradilan.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Target kinerja: 98

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik, karena mencerminkan persepsi pengguna terhadap pelayanan yang diterima.

Berdasarkan formulir monitoring realisasi kinerja kepaniteraan Triwulan III Tahun 2026, nilai yang tercantum adalah sebagai berikut.

Komponen	Nilai
Target indikator	98
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,60
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	99,57
Rata-rata realisasi yang dilaporkan	99,09
Capaian terhadap target	101,11%

Berdasarkan data tersebut, rata-rata realisasi indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan mencapai 99,09, atau lebih tinggi 1,09 poin dibandingkan target sebesar 98. Apabila dinyatakan sebagai persentase capaian terhadap target, indikator tersebut mencapai 101,11%. Dengan demikian, secara kuantitatif indikator kepuasan pengguna layanan telah melampaui target yang ditetapkan.

Nilai IKM sebesar 98,60 menunjukkan capaian yang berada di atas target indikator, sedangkan IPAK sebesar 99,57 menunjukkan nilai persepsi yang tinggi terhadap aspek antikorupsi dalam pelayanan yang dinilai. Kedua nilai tersebut menjadi bagian dari dasar evaluasi kepuasan dan kepercayaan publik sebagaimana tercantum dalam formulir.

Dari perspektif akuntabilitas, capaian di atas target perlu dipertahankan dan tidak cukup hanya dipandang sebagai keberhasilan pengukuran pada satu periode. Pengadilan perlu memastikan bahwa kualitas pelayanan yang dinilai masyarakat tetap terjaga dalam pelaksanaan sehari-hari, termasuk kejelasan prosedur,

kemudahan memperoleh informasi, ketepatan pelayanan, keterbukaan, serta perlakuan yang adil kepada seluruh pengguna layanan.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan, evaluasi tetap perlu dilakukan untuk memastikan bahwa capaian tersebut sejalan dengan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan data pada aplikasi MOTOR KINETIS, realisasi indikator kepuasan pengguna layanan pengadilan mencapai 99,09 dengan capaian sebesar 101,11% dari target 98,00. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,60 dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 99,57. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas penyelenggaraan pelayanan pengadilan berada pada tingkat yang sangat baik.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III Tahun 2026 yang diunggah sebagai eviden pada MOTOR KINETIS memuat penilaian terhadap berbagai unsur pelayanan. Pada aspek pelayanan, nilai rata-rata tertinggi tercatat pada kesesuaian persyaratan pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, serta kualitas sarana dan prasarana, masing-masing sebesar 3,96 pada skala 4. Sementara itu, unsur kewajaran biaya atau tarif pelayanan memperoleh nilai rata-rata 3,88, yang merupakan nilai terendah di antara unsur pelayanan yang dinilai. Kondisi tersebut dapat menjadi bahan perhatian dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, tanpa serta-merta menunjukkan adanya permasalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Pada aspek persepsi antikorupsi, hasil survei juga menunjukkan penilaian yang sangat positif terhadap unsur nondiskriminasi pelayanan, tidak adanya pelayanan di luar prosedur, tidak adanya penerimaan imbalan di luar ketentuan, tidak adanya pungutan liar, serta tidak adanya percaloan. Meskipun demikian, hasil survei tetap perlu dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk menjaga konsistensi integritas dan kualitas pelayanan, bukan hanya sebagai bukti pemenuhan target indikator kinerja.

Laporan survei merekomendasikan agar kualitas pelayanan yang telah dinilai baik dan memuaskan tetap dipertahankan, disertai peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Oleh karena itu, tindak lanjut pada Triwulan IV diarahkan pada pemeliharaan standar pelayanan, peningkatan kualitas fasilitas pendukung,

serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan pelayanan yang terukur. Selain itu, dokumentasi tindak lanjut atas rekomendasi survei perlu diperjelas agar setiap rekomendasi yang relevan dapat ditelusuri pelaksanaannya.

Dengan demikian, indikator kepuasan pengguna layanan pengadilan telah melampaui target berdasarkan perhitungan pada MOTOR KINETIS, dengan realisasi 99,09 dan capaian 101,11%. Fokus evaluasi selanjutnya bukan semata-mata pada peningkatan angka capaian, melainkan pada keberlanjutan kualitas pelayanan, pemeliharaan integritas aparatur, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan tindak lanjut hasil survei untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

2. Evaluasi Keseluruhan Sasaran Kinerja Kepuasan dan Kepercayaan Publik

Sasaran kinerja meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik berkaitan erat dengan kemampuan pengadilan menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, transparan, responsif, dan berintegritas. Capaian indeks kepuasan pengguna layanan yang melampaui target memberikan gambaran positif terhadap indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut.

Namun, penilaian atas kepercayaan publik perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang tersedia. Nilai IKM dan IPAK yang tinggi menunjukkan hasil pengukuran yang positif, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek pelayanan telah bebas dari kelemahan. Evaluasi tetap perlu mempertimbangkan masukan pengguna, pengaduan yang diterima, tindak lanjut perbaikan, dan konsistensi penerapan standar pelayanan.

Oleh karena itu, pengendalian pada Triwulan IV sebaiknya diarahkan pada pemeliharaan capaian sekaligus peningkatan kualitas tindak lanjut. Pengadilan perlu memastikan bahwa setiap masukan yang relevan ditangani secara tepat, kelemahan pelayanan yang ditemukan diperbaiki, dan hasil perbaikan didokumentasikan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian, keberhasilan sasaran ini tidak hanya diukur melalui angka indeks yang melampaui target, tetapi juga melalui konsistensi kualitas pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

D. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kesekretariatan

Kinerja kesekretariatan pada Triwulan III Tahun 2026 dievaluasi berdasarkan enam indikator, yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP

ASN), IKPA DIPA-01, IKPA DIPA-05, NKPA DIPA-01, NKPA DIPA-05, dan Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

Keenam indikator tersebut memiliki karakteristik pengukuran yang berbeda. IP ASN berkaitan dengan profesionalitas aparatur, IKPA mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, NKPA mengukur kinerja perencanaan anggaran berdasarkan komponen penilaiannya, sedangkan IPA berkaitan dengan kualitas pengelolaan aset. Karena itu, analisis setiap indikator harus mengacu pada target dan komponen pembentuknya masing-masing.

1. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Target kinerja: 81

IP ASN merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas aparatur sipil negara berdasarkan aspek-aspek penilaian yang ditetapkan dalam mekanisme pengukuran IP ASN. Berdasarkan formulir monitoring realisasi kinerja kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026, nilai IP ASN yang dilaporkan adalah 83,02, dengan capaian terhadap target sebesar 102,49%.

Rincian komponen IP ASN yang tercantum dalam formulir adalah sebagai berikut.

Komponen	Nilai Juli	Nilai Agustus	Nilai September
Kualifikasi	23,29	23,29	23,29
Kompetensi	31,59	31,59	31,59
Kinerja	24,29	24,29	24,29
Disiplin	5,00	5,00	5,00
Total IP ASN	83,02	83,02	83,02

Berdasarkan data tersebut, nilai IP ASN tetap sebesar 83,02 selama Juli, Agustus, dan September. Nilai ini lebih tinggi 2,02 poin daripada target sebesar 81, sehingga secara kuantitatif indikator profesionalitas aparatur telah melampaui target yang ditetapkan.

Stabilitas nilai selama tiga bulan menunjukkan bahwa nilai yang dilaporkan tidak mengalami perubahan dalam periode monitoring. Akan tetapi, stabilitas nilai tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan. Nilai yang sama dapat mencerminkan konsistensi data penilaian,

tetapi evaluasi mengenai perkembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur tetap memerlukan informasi pendukung.

Dari sisi pengendalian, nilai IP ASN yang telah melampaui target perlu dipertahankan melalui pemutakhiran data kepegawaian, pemeriksaan kesesuaian data kualifikasi, pemantauan pemenuhan pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek disiplin juga perlu tetap dijaga karena merupakan salah satu komponen yang tercantum dalam pengukuran.

Selain itu, nilai IP ASN perlu digunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan kompetensi hendaknya diselaraskan dengan kebutuhan organisasi dan tugas jabatan, sehingga capaian indikator tidak hanya dipertahankan secara administratif, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas.

Kesimpulan evaluasi: IP ASN mencapai 83,02 atau 102,49% dari target dan telah melampaui sasaran yang ditetapkan. Tindak lanjut diarahkan pada pemeliharaan kualitas data kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta penguatan profesionalitas dan disiplin aparatur.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01

Target kinerja: 96

IKPA merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan komponen penilaian yang ditetapkan. Untuk DIPA-01, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran satuan kerja berjalan sesuai perencanaan, memenuhi ketentuan administrasi, dan menghasilkan output yang ditargetkan.

Berdasarkan formulir monitoring kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026, nilai IKPA DIPA-01 yang dilaporkan pada September adalah 98,53, dengan capaian terhadap target sebesar 102,64%.

Rincian komponen IKPA DIPA-01 dalam formulir adalah sebagai berikut.

Komponen penilaian	Juli	Agustus	September
Revisi DIPA	100,00	100,00	100,00
Deviasi Halaman III DIPA	100,00	92,28	90,52
Penyerapan anggaran	99,20	99,48	99,74
Belanja kontraktual	100,00	100,00	100,00

Penyelesaian tagihan	100,00	100,00	100,00
Pengelolaan UP dan TUP	99,98	99,98	99,99
Capaian output	100,00	100,00	100,00
Dispensasi SPM (pengurangan)	0,00	0,00	0,00
Nilai IKPA yang dilaporkan	99,84	98,74	98,53

Hasil monitoring menunjukkan bahwa nilai IKPA DIPA-01 mengalami penurunan dari 99,84 pada Juli menjadi 98,74 pada Agustus dan 98,53 pada September. Walaupun demikian, nilai pada September masih berada 2,53 poin di atas target 96. Dengan capaian terhadap target sebesar 102,64%, indikator ini secara keseluruhan telah melampaui sasaran kinerja yang ditetapkan.

Analisis terhadap komponen penilaian menunjukkan adanya perkembangan yang perlu dicermati. Komponen revisi DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan capaian output tercatat 100,00 selama periode tersebut. Pengelolaan UP dan TUP juga relatif stabil, dari 99,98 menjadi 99,99. Penyerapan anggaran meningkat dari 99,20 pada Juli menjadi 99,74 pada September.

Di sisi lain, komponen deviasi Halaman III DIPA menurun dari 100,00 pada Juli menjadi 92,28 pada Agustus dan 90,52 pada September. Perkembangan ini perlu menjadi perhatian karena nilai IKPA keseluruhan juga menunjukkan penurunan selama periode yang sama. Meskipun data tersebut memperlihatkan arah perubahan yang bersamaan, penurunan IKPA tidak dapat dinyatakan sepenuhnya disebabkan oleh komponen deviasi Halaman III DIPA tanpa pemeriksaan mekanisme pembobotan dan perhitungan yang berlaku.

Dari sisi pengendalian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian nilai IKPA di atas target perlu diikuti dengan upaya mempertahankan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penyesuaian rencana penarikan dana perlu dicermati agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, sedangkan perkembangan realisasi anggaran perlu dipantau agar tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat memengaruhi penilaian periode berikutnya.

Perhatian juga perlu diberikan pada ketepatan waktu penyelesaian tagihan, tertib administrasi UP dan TUP, konsistensi pencatatan capaian output, serta kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran. Meskipun komponen-komponen tersebut tercatat baik dalam formulir, pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan kualitas pelaksanaannya terjaga sampai akhir tahun.

Kesimpulan evaluasi: IKPA DIPA-01 mencapai 98,53 atau 102,64% dari target dan telah melampaui sasaran. Namun, penurunan nilai IKPA dari Juli hingga September serta penurunan komponen deviasi Halaman III DIPA perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi perencanaan penarikan dana dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05

Target kinerja: 95

IKPA DIPA-05 merupakan indikator untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada DIPA-05. Berdasarkan formulir monitoring kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026, nilai IKPA DIPA-05 yang dilaporkan pada September adalah 89,29, dengan capaian terhadap target sebesar 94,00%. Dengan demikian, indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Rincian komponen penilaian IKPA DIPA-05 yang tercantum dalam formulir adalah sebagai berikut.

Komponen penilaian	Juli	Agustus	September
Revisi DIPA	100,00	100,00	100,00
Deviasi Halaman III DIPA	76,19	87,13	71,70
Penyerapan anggaran	76,21	79,51	80,72
Belanja kontraktual	n/a	n/a	n/a
Penyelesaian tagihan	100,00	100,00	100,00
Pengelolaan UP dan TUP	93,39	95,66	94,84
Capaian output	63,89	90,20	95,93
Dispensasi SPM (pengurangan)	0,00	0,00	0,00
Nilai IKPA yang dilaporkan	88,28*	90,10*	89,29

Berdasarkan data tersebut, nilai IKPA DIPA-05 pada September 2026 mencapai 89,29 atau masih terpaut 5,71 poin dari target sebesar 95. Apabila ditelaah berdasarkan perkembangan komponen penilaiannya, terdapat beberapa perkembangan positif, khususnya pada penyerapan anggaran yang meningkat dari 76,21 pada Juli menjadi 80,72 pada September, serta capaian output yang meningkat dari 63,89 pada Juli menjadi 95,93 pada September. Komponen revisi DIPA dan penyelesaian tagihan juga tetap berada pada nilai 100,00 selama periode pemantauan.

Namun demikian, terdapat komponen yang masih memerlukan perhatian. Nilai deviasi Halaman III DIPA mengalami penurunan dari 87,13 pada Agustus

menjadi 71,70 pada September. Selain itu, pengelolaan UP dan TUP turun dari 95,66 pada Agustus menjadi 94,84 pada September. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada beberapa komponen belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan yang konsisten pada seluruh komponen penilaian IKPA.

Berdasarkan keterangan kendala yang disampaikan oleh penanggung jawab indikator melalui MOTOR KINETIS, nilai IKPA DIPA-05 yang masih berada di bawah target terutama menjadi perhatian pada komponen deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran, serta optimalisasi penyerapan anggaran sesuai jadwal kegiatan yang telah direncanakan.

Sebagai tindak lanjut, penanggung jawab indikator telah menyampaikan bahwa langkah korektif dilakukan melalui pengajuan revisi pengurangan anggaran terhadap sisa pagu kegiatan yang diperkirakan sulit direalisasikan, khususnya anggaran sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan. Langkah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan kemampuan realisasi satuan kerja, sekaligus meningkatkan kesesuaian rencana penarikan dana dengan kondisi pelaksanaan anggaran.

Selain itu, pengendalian pada Triwulan IV diarahkan pada penyesuaian rencana penarikan dana, pemantauan proses revisi, percepatan realisasi anggaran yang masih dapat dilaksanakan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut perlu terus dipantau agar penyesuaian anggaran dapat mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian target kinerja.

Dengan demikian, capaian IKPA DIPA-05 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan adanya perbaikan pada komponen penyerapan anggaran dan capaian output, tetapi nilai keseluruhan indikator masih belum memenuhi target. Tindak lanjut yang telah direncanakan melalui MOTOR KINETIS menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta meningkatkan capaian IKPA pada Triwulan IV.

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01 (NKPA DIPA-01)

Target kinerja: 96

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01 (NKPA DIPA-01) merupakan indikator untuk menilai kinerja perencanaan anggaran berdasarkan komponen pengukuran yang telah ditetapkan. Dalam melakukan evaluasi terhadap indikator ini, perlu dibedakan antara NKPA dan IKPA karena keduanya menggunakan komponen dan mekanisme penilaian yang berbeda.

Berdasarkan hasil pemantauan kinerja Triwulan III Tahun 2026 melalui aplikasi MOTOR KINETIS, nilai NKPA DIPA-01 yang dilaporkan sampai dengan September 2026 adalah sebesar 81,25, dengan capaian terhadap target sebesar 84,64%. Dengan demikian, indikator ini belum mencapai target kinerja sebesar 96.

Rincian komponen NKPA DIPA-01 adalah sebagai berikut.

Komponen	Juli	Agustus	September
Efektivitas Capaian Rincian Output (RO)	75,00	75,00	75,00
Efisiensi Penggunaan SBK	100,00	100,00	100,00
Efisiensi Efisiensi SBK	100,00	100,00	100,00
Nilai NKPA yang dilaporkan	81,25	81,25	81,25

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa nilai NKPA DIPA-01 berada pada angka 81,25 selama Juli sampai dengan September 2026. Nilai tersebut masih berada di bawah target sebesar 96, dengan selisih 14,75 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator NKPA DIPA-01 masih memerlukan perhatian, khususnya pada komponen efektivitas yang diukur melalui capaian kinerja Rincian Output (RO).

Berdasarkan keterangan kendala yang disampaikan oleh penanggung jawab indikator melalui MOTOR KINETIS, capaian RO sebesar 75,00 terutama dipengaruhi oleh masih adanya RO yang pelaksanaannya berlangsung secara bertahap atau *on progress*, antara lain RO Layanan Operasional Kantor yang memiliki volume target satu layanan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran capaian RO tersebut dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan secara proporsional terhadap tahapan pelaksanaan, sehingga pada Triwulan III capaian belum mencapai 100,00.

Sementara itu, komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK masing-masing telah mencapai nilai 100,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua komponen efisiensi tersebut telah mencapai nilai optimal berdasarkan hasil pengukuran yang tercantum dalam aplikasi. Oleh karena itu, kesenjangan nilai NKPA DIPA-01 perlu dianalisis dengan memperhatikan karakteristik komponen capaian RO dan mekanisme pengukurannya, tanpa mengabaikan capaian positif pada komponen lainnya.

Sebagai tindak lanjut, penanggung jawab indikator telah merencanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan RO yang masih berlangsung, khususnya RO Layanan Operasional Kantor, untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan dan pemenuhan target dapat diselesaikan sesuai rencana hingga akhir Tahun Anggaran 2026. Selain itu, kelengkapan dan pemutakhiran data realisasi RO perlu dipastikan agar sesuai dengan perkembangan pelaksanaan yang sebenarnya. Pengendalian juga diarahkan untuk mempertahankan capaian optimal pada komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK.

Dengan demikian, capaian NKPA DIPA-01 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK telah mencapai nilai 100,00, sedangkan komponen capaian RO masih berada pada nilai 75,00 karena masih terdapat keluaran yang pelaksanaannya berlangsung secara bertahap. Fokus tindak lanjut pada Triwulan IV diarahkan pada pemantauan penyelesaian RO, pemutakhiran data realisasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran agar capaian NKPA DIPA-01 dapat meningkat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05 (NKPA DIPA-05)

Target kinerja: 91

NKPA DIPA-05 merupakan indikator untuk menilai kinerja perencanaan anggaran berdasarkan komponen pengukuran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan kinerja Triwulan III Tahun 2026 melalui aplikasi MOTOR KINETIS, nilai NKPA DIPA-05 yang dilaporkan sampai dengan September 2026 adalah sebesar 41,19, dengan capaian terhadap target sebesar 45,26%. Dengan demikian, indikator ini belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu 91, sehingga masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut perbaikan pada Triwulan IV.

Rincian komponen yang tercantum dalam formulir adalah sebagai berikut.

Komponen	Juli	Agustus	September
Efektivitas Capaian Rincian Output (RO)	41,58	12,50	12,50
Efisiensi Penggunaan SBK	100,00	100,00	100,00
Efisiensi Nilai Efisiensi SBK	0,00	0,00	0,00
Nilai NKPA yang dilaporkan	41,19	41,19	41,19

Berdasarkan data tersebut, komponen capaian Rincian Output (CRO) menjadi salah satu aspek utama yang perlu mendapatkan perhatian karena nilainya masih berada di bawah nilai maksimum 75. Sementara itu, komponen penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) telah mencapai 100,00, sedangkan komponen efisiensi SBK tercatat sebesar 0,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian NKPA DIPA-05 perlu dievaluasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing komponen penilaian, khususnya capaian output dan ketersediaan nilai pada komponen efisiensi SBK.

Berdasarkan keterangan kendala yang disampaikan oleh penanggung jawab indikator melalui MOTOR KINETIS, nilai CRO yang belum optimal dipengaruhi oleh karakteristik sebagian besar Rincian Output yang pelaksanaannya berlangsung secara berkala sepanjang tahun dan bersifat *demand-driven*, yaitu mengikuti kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab indikator juga menjelaskan bahwa pelaporan realisasi volume Rincian Output dilakukan secara penuh setelah seluruh tahapan kegiatan operasional tahun berjalan selesai dilaksanakan. Dengan karakteristik tersebut, capaian volume RO yang dilaporkan pada periode berjalan belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan output yang diperkirakan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Penjelasan tersebut menjadi konteks penting dalam mengevaluasi capaian NKPA DIPA-05. Meskipun demikian, rendahnya nilai CRO tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan realisasi masing-masing RO dan pemutakhiran data secara berkala agar perkembangan pelaksanaan kegiatan dapat tercatat secara akurat. Selain itu, nilai efisiensi SBK sebesar 0,00 perlu menjadi perhatian untuk ditelaah lebih lanjut berdasarkan data dan mekanisme penghitungan yang berlaku, sehingga faktor yang memengaruhi nilai akhir NKPA dapat dipahami secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, penanggung jawab indikator telah merencanakan percepatan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah terlaksana agar target volume output dapat segera diinput secara penuh pada akhir tahun anggaran. Selain itu, pemantauan dan pemutakhiran data realisasi volume fisik perlu dilakukan secara berkala melalui aplikasi Monev DJA/SMART untuk mendukung pencatatan akumulasi nilai CRO satuan kerja secara optimal pada penutupan tahun anggaran.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut perlu disertai pemantauan terhadap RO yang belum mencapai target, pemeriksaan kesesuaian antara realisasi fisik dan data yang dilaporkan, serta koordinasi dengan unit pelaksana kegiatan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan data capaian output dan mendukung perbaikan nilai NKPA DIPA-05 pada akhir Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, capaian NKPA DIPA-05 pada Triwulan III Tahun 2026 masih berada di bawah target, dengan nilai 41,19 atau 45,26% dari target 91. Kendala yang disampaikan pengampu indikator terutama berkaitan dengan karakteristik pelaksanaan dan pelaporan volume RO yang berlangsung sepanjang tahun. Oleh karena itu, fokus pengendalian pada Triwulan IV diarahkan pada percepatan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan, pemutakhiran data realisasi volume fisik secara berkala, serta penelaahan lebih lanjut terhadap komponen yang memengaruhi nilai akhir NKPA agar capaian kinerja dapat meningkat berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Target kinerja: 3

Indikator Pengelolaan Aset digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan BMN berdasarkan komponen penilaian yang tercantum dalam formulir monitoring. Pengelolaan aset yang baik merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel karena berkaitan dengan tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan, pengawasan, dan pemanfaatan aset negara.

Berdasarkan formulir monitoring kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026, nilai IPA yang dilaporkan pada September adalah 2,67 dari target 3, dengan capaian terhadap target sebesar 89,00%.

Rincian komponen penilaian IPA yang tercantum dalam formulir adalah sebagai berikut.

Komponen penilaian	Nilai
Penatausahaan BMN	2,50
Realisasi PNBP dari pengelolaan aset	2,75
Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan	2,60
Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif	2,70
Administrasi BMN yang andal	2,83
Nilai IPA yang dilaporkan	2,67

Berdasarkan data tersebut, nilai IPA mencapai 2,67, sehingga masih terdapat selisih 0,33 poin dari target 3. Capaian terhadap target sebesar 89,00% menunjukkan bahwa indikator pengelolaan aset belum sepenuhnya memenuhi sasaran yang ditetapkan.

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada Triwulan III Tahun 2026 mencatat realisasi sebesar 2,67 dari target 3,00, dengan capaian sebesar 89,00%. Dengan demikian, indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data monitoring pada aplikasi MOTOR KINETIS, penanggung jawab indikator belum mencantumkan keterangan mengenai kendala atau faktor penghambat maupun rencana aksi atau solusi perbaikan. Oleh karena itu, penyebab belum optimalnya capaian IPA belum dapat disimpulkan berdasarkan informasi yang tersedia.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap komponen penilaian pengelolaan aset untuk mengidentifikasi aspek yang belum mencapai nilai maksimal serta faktor yang memengaruhinya. Penanggung jawab indikator perlu melengkapi penjelasan kendala berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan menyusun rencana tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi faktual. Langkah ini diperlukan agar upaya perbaikan capaian IPA dapat dirumuskan secara terarah, didukung data, dan dapat dipantau pelaksanaannya pada Triwulan IV.

7. Evaluasi Keseluruhan Sasaran Kinerja Kesekretariatan

Berdasarkan rekapitulasi monitoring kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026, capaian keenam indikator memperlihatkan bahwa sebagian indikator telah

melampaui target, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan. Ringkasan capaian tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian terhadap target	Status evaluasi
IP ASN	81	83,02	102,49%	Melampaui target
IKPA DIPA-01	96	98,53	102,64%	Melampaui target
IKPA DIPA-05	95	89,29	94,00%	Belum mencapai target
NKPA DIPA-01	96	81,25	84,64%	Belum mencapai target
NKPA DIPA-05	91	41,19	45,26%	Belum mencapai target
IPA	3	2,67	89,00%	Belum mencapai target

Hasil tersebut menunjukkan bahwa IP ASN dan IKPA DIPA-01 telah mencapai nilai di atas target. Kedua indikator ini perlu dipertahankan melalui pengendalian rutin, pemeliharaan kualitas data, dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.

Sebaliknya, IKPA DIPA-05, NKPA DIPA-01, NKPA DIPA-05, dan IPA masih berada di bawah target. Kesenjangan tersebut tidak dapat ditangani dengan pendekatan yang sama karena masing-masing indikator memiliki mekanisme pengukuran dan komponen pembentuk yang berbeda.

Untuk IKPA DIPA-05, evaluasi perlu difokuskan pada komponen penilaian yang mengalami penurunan atau belum optimal, terutama deviasi Halaman III DIPA dan pengelolaan UP dan TUP. Untuk NKPA DIPA-01, perhatian diarahkan pada penelaahan komponen capaian RO yang tercatat 75,00. Sementara itu, NKPA DIPA-05 memerlukan perhatian lebih intensif karena nilai capaian RO tercatat 12,50 dan nilai NKPA masih jauh di bawah target. Adapun IPA perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi komponen pengelolaan aset yang nilainya belum maksimal.

Dengan mempertimbangkan sisa periode pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, pengendalian Triwulan IV perlu dilakukan secara lebih terfokus dan terukur. Setiap unit penanggung jawab perlu mengidentifikasi komponen yang masih dapat diperbaiki, menyusun langkah tindak lanjut berdasarkan data, dan memantau perkembangan capaian secara berkala.

Evaluasi juga harus memperhatikan perbedaan antara indikator yang nilainya dapat berubah melalui perbaikan administrasi dan indikator yang bergantung pada pelaksanaan kegiatan atau karakteristik pengukuran tertentu.

Hal ini penting agar rekomendasi yang disusun realistis, sesuai ketentuan, dan tidak menimbulkan ekspektasi pencapaian yang tidak didukung oleh data.

Kesimpulan evaluasi kesekretariatan: kinerja kesekretariatan menunjukkan capaian yang belum merata. IP ASN dan IKPA DIPA-01 telah melampaui target, sedangkan IKPA DIPA-05, NKPA DIPA-01, NKPA DIPA-05, dan IPA perlu menjadi prioritas perbaikan. Pengendalian Triwulan IV harus diarahkan pada analisis komponen pembentuk indikator, validasi data, percepatan tindak lanjut yang memungkinkan, serta dokumentasi hasil perbaikan.

E. Evaluasi Ketercapaian Sasaran Kinerja secara Keseluruhan

1. Evaluasi Keseluruhan Sasaran Kinerja Kesekretariatan

Berdasarkan rekapitulasi monitoring kinerja kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026 melalui aplikasi MOTOR KINETIS, capaian enam indikator kesekretariatan menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian indikator telah melampaui target yang ditetapkan, sedangkan indikator lainnya masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut perbaikan. Ringkasan capaian tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian terhadap Target	Status Evaluasi
IP ASN	81	83,02	102,49%	Melampaui target
IKPA DIPA-01	96	98,53	102,64%	Melampaui target
IKPA DIPA-05	95	89,29	94,00%	Belum mencapai target
NKPA DIPA-01	96	81,25	84,64%	Belum mencapai target
NKPA DIPA-05	91	41,19	45,26%	Belum mencapai target
IPA	3	2,67	89,00%	Belum mencapai target

Hasil tersebut menunjukkan bahwa IP ASN dan IKPA DIPA-01 telah mencapai nilai di atas target. Kedua indikator tersebut perlu dipertahankan melalui pengendalian rutin, pemeliharaan kualitas data, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, IKPA DIPA-05, NKPA DIPA-01, NKPA DIPA-05, dan IPA masih berada di bawah target. Kesenjangan tersebut perlu ditangani berdasarkan karakteristik dan komponen pembentuk masing-masing indikator, sehingga langkah perbaikan yang dilakukan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan tugas.

Pada indikator IKPA DIPA-05, nilai realisasi September sebesar 89,29 belum mencapai target 95. Berdasarkan penjelasan pengampu indikator dalam MOTOR KINETIS, perhatian utama diarahkan pada deviasi Halaman III DIPA yang tercatat sebesar 71,70 dan penyerapan anggaran sebesar 80,72. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan langkah korektif melalui pengajuan revisi pengurangan anggaran terhadap sisa pagu kegiatan yang diperkirakan sulit direalisasikan, khususnya anggaran sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan kemampuan realisasi satuan kerja, serta meningkatkan kesesuaian rencana penarikan dana dengan pelaksanaan anggaran.

Pada indikator NKPA DIPA-01, nilai realisasi sebesar 81,25 masih berada di bawah target 96. Komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK telah mencapai 100,00, sedangkan capaian Rincian Output (RO) tercatat sebesar 75,00. Berdasarkan penjelasan pengampu indikator, kondisi tersebut terutama berkaitan dengan masih adanya RO yang pelaksanaannya berlangsung secara bertahap atau *on progress*, antara lain RO Layanan Operasional Kantor yang memiliki volume target satu layanan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, tindak lanjut diarahkan pada pemantauan berkala terhadap pelaksanaan RO, pemutakhiran data realisasi, serta pengendalian penyelesaian kegiatan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, NKPA DIPA-05 merupakan indikator yang memerlukan perhatian lebih intensif karena nilai realisasinya sebesar 41,19 baru mencapai 45,26% dari target 91. Berdasarkan data terbaru pada MOTOR KINETIS, komponen capaian Rincian Output (CRO) tercatat sebesar 41,58, komponen penggunaan SBK sebesar 100,00, dan komponen efisiensi SBK sebesar 0,00. Pengampu indikator menjelaskan bahwa sebagian besar RO memiliki karakteristik kegiatan yang berlangsung secara berkala sepanjang tahun dan bersifat *demand-driven*, sedangkan pelaporan realisasi volume RO dilakukan secara penuh setelah seluruh tahapan kegiatan operasional tahun berjalan selesai dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut, direncanakan percepatan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah terlaksana serta pemutakhiran data

realisasi volume fisik secara berkala melalui aplikasi Monev DJA/SMART. Selain itu, komponen efisiensi SBK yang tercatat 0,00 perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan data dan mekanisme penghitungan yang berlaku.

Adapun indikator IPA dengan realisasi 2,67 dari target 3 juga masih memerlukan perbaikan. Evaluasi terhadap indikator ini perlu diarahkan pada komponen pengelolaan aset yang belum mencapai nilai maksimal, disertai pemeriksaan terhadap data pendukung dan identifikasi aspek yang masih dapat ditingkatkan. Langkah perbaikan hendaknya didasarkan pada hasil evaluasi komponen penilaian dan bukti pengelolaan aset yang tersedia.

Dengan mempertimbangkan sisa periode pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, pengendalian pada Triwulan IV perlu dilakukan secara lebih terfokus dan terukur. Setiap unit penanggung jawab perlu memantau komponen indikator yang masih dapat diperbaiki, melaksanakan rencana aksi sesuai kondisi yang sebenarnya, serta memastikan kelengkapan dan ketepatan data capaian. Pengendalian tersebut juga perlu membedakan indikator yang dapat diperbaiki melalui penyesuaian administrasi dan data dengan indikator yang bergantung pada pelaksanaan kegiatan serta karakteristik pengukuran tertentu.

Kesimpulan evaluasi kesekretariatan: capaian kinerja kesekretariatan pada Triwulan III Tahun 2026 belum merata. IP ASN dan IKPA DIPA-01 telah melampaui target, sedangkan IKPA DIPA-05, NKPA DIPA-01, NKPA DIPA-05, dan IPA masih memerlukan tindak lanjut. Oleh karena itu, pengendalian Triwulan IV perlu diarahkan pada perbaikan komponen pembentuk indikator, validasi data, pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta dokumentasi hasil tindak lanjut melalui MOTOR KINETIS agar perkembangan kinerja dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

2. Evaluasi Ketercapaian Sasaran Kinerja secara Keseluruhan

Berdasarkan hasil monitoring terhadap indikator kepaniteraan, kepuasan pengguna layanan, dan kesekretariatan, pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan capaian positif pada sejumlah indikator, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan dan pengendalian lebih lanjut.

Pada bidang kepaniteraan, sebagian besar indikator pelayanan administrasi perkara menunjukkan realisasi 100% selama Juli sampai dengan September 2026, meliputi penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu, pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan, pengunggahan putusan pada Direktori

Putusan, serta penggunaan e-Court. Meskipun demikian, indikator penyelesaian perkara secara tepat waktu masih memerlukan perhatian karena rata-rata realisasinya sebesar 83,33%, lebih rendah daripada target 91%. Berdasarkan penjelasan unit pengampu yang dicatat melalui MOTOR KINETIS, salah satu kendala yang disampaikan berkaitan dengan rangkaian tahapan persidangan dalam penanganan Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN-SRG. Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memahami kondisi penanganan perkara, dengan tetap memperhatikan kewenangan majelis hakim serta perlunya pemantauan dan dokumentasi perkembangan perkara secara berkala.

Pada aspek kepuasan dan kepercayaan publik, indikator kepuasan pengguna layanan pengadilan mencatat realisasi sebesar 99,09, dengan capaian terhadap target sebesar 101,11%. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,60 dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 99,57 sebagaimana tercantum pada dashboard MOTOR KINETIS. Hasil survei Triwulan III menunjukkan penilaian yang positif terhadap kualitas pelayanan dan integritas. Oleh karena itu, fokus tindak lanjut diarahkan pada pemeliharaan standar pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta pemanfaatan rekomendasi survei sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dokumentasi tindak lanjut atas rekomendasi survei juga perlu diperjelas agar pelaksanaannya dapat ditelusuri.

Pada bidang kesekretariatan, IP ASN dan IKPA DIPA-01 telah melampaui target. Namun, IKPA DIPA-05, NKPA DIPA-01, NKPA DIPA-05, dan IPA masih berada di bawah target masing-masing. Berdasarkan penjelasan pengampu melalui MOTOR KINETIS, tindak lanjut untuk indikator-indikator tersebut telah diarahkan sesuai karakteristik permasalahannya, antara lain penyesuaian rencana penarikan dana dan anggaran pada IKPA DIPA-05, pemantauan penyelesaian RO pada NKPA DIPA-01, serta percepatan penyelesaian administrasi dan pemutakhiran data realisasi volume fisik pada NKPA DIPA-05. Adapun IPA memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap komponen pengelolaan aset yang belum maksimal.

Secara substantif, hasil monitoring tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mencapai target pada beberapa indikator belum sepenuhnya diikuti oleh ketercapaian seluruh sasaran kinerja. Oleh karena itu, evaluasi perlu memperhatikan nilai capaian sekaligus kendala, karakteristik pengukuran, dan rencana aksi dari masing-masing unit pengampu. Pemanfaatan MOTOR KINETIS sebagai sarana pengumpulan data capaian, dokumentasi kendala, dan pencatatan

rencana aksi menjadi bagian penting dalam mendukung proses evaluasi dan pengendalian kinerja yang lebih terarah.

Sebagai tindak lanjut, hasil monitoring Triwulan III perlu menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV dengan memperhatikan prioritas perbaikan, penanggung jawab, target tindak lanjut, serta bukti pelaksanaan yang dapat diverifikasi. Pemantauan berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa langkah perbaikan berjalan sesuai rencana dan perkembangan capaian dapat diketahui secara objektif.

Dengan demikian, evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan realisasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menindaklanjuti kendala yang telah didokumentasikan, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Analisis Umum Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Analisis capaian kinerja merupakan tahapan evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama Triwulan III Tahun 2026. Analisis ini tidak hanya berfokus pada perbandingan antara target dan realisasi, tetapi juga mempertimbangkan konsistensi capaian, kesenjangan terhadap target, karakteristik masing-masing indikator, kendala yang disampaikan unit pengampu, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan monitoring kinerja pada periode ini didukung oleh aplikasi MOTOR KINETIS sebagai sarana pengumpulan data capaian, penyampaian keterangan kendala, pencatatan rencana aksi, dan penyediaan eviden pendukung oleh unit penanggung jawab indikator. Penggunaan aplikasi tersebut memberikan dasar yang lebih terstruktur bagi proses evaluasi karena angka capaian dapat ditelaah bersama penjelasan operasional dan dokumen pendukung yang diunggah oleh unit terkait.

Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana diuraikan dalam Bab III, capaian kinerja PTUN Serang menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian besar indikator pelayanan administrasi perkara telah mencapai target, indikator kepuasan pengguna layanan telah melampaui target, dan sejumlah indikator kesekretariatan juga telah menunjukkan capaian yang baik. Namun, beberapa indikator masih berada di bawah target dan memerlukan pengendalian lebih lanjut, terutama penyelesaian perkara tepat waktu, IKPA DIPA-05, NKPA DIPA-01, NKPA DIPA-05, dan Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

Pada bidang kepaniteraan, indikator penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu, pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan, publikasi putusan pada Direktori Putusan, serta penggunaan e-Court telah menunjukkan realisasi 100% selama Juli sampai dengan September 2026. Sementara itu, indikator penyelesaian perkara tepat waktu mencatat rata-rata

realisasi sebesar 83,33%, lebih rendah daripada target 91%. Penjelasan unit pengampu yang telah dicatat dalam MOTOR KINETIS memberikan konteks tambahan mengenai proses penanganan salah satu perkara yang menjadi perhatian evaluasi, sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada angka capaian bulanan.

Pada aspek kepuasan dan kepercayaan publik, dashboard MOTOR KINETIS menunjukkan realisasi indikator sebesar 99,09 dari target 98,00, dengan capaian terhadap target sebesar 101,11%. Realisasi tersebut dihitung dari rata-rata IKM sebesar 98,60 dan IPAK sebesar 99,57. Laporan survei yang diunggah sebagai eviden memuat hasil penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan dan persepsi antikorupsi. Hasil tersebut menunjukkan penilaian yang positif, tetapi tetap perlu diikuti dengan pemeliharaan standar pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, serta dokumentasi tindak lanjut hasil survei.

Pada bidang kesekretariatan, IP ASN mencapai 83,02 dari target 81,00 dan IKPA DIPA-01 mencapai 98,53 dari target 96,00. Kedua indikator tersebut telah melampaui target. Di sisi lain, IKPA DIPA-05 mencapai 89,29 dari target 95,00, NKPA DIPA-01 mencapai 81,25 dari target 96,00, NKPA DIPA-05 mencapai 41,19 dari target 91,00, dan IPA mencapai 2,67 dari target 3,00. Keterangan kendala dan rencana aksi yang dicatat dalam MOTOR KINETIS membantu mengarahkan analisis pada komponen yang perlu diperbaiki, meskipun kelengkapan dokumentasi antarindikator belum sepenuhnya merata.

Penggunaan MOTOR KINETIS memberikan dampak positif terhadap proses monitoring dan evaluasi karena penanggung jawab indikator dapat mencatat kendala dan rencana aksi secara langsung pada indikator yang dipantau. Dengan demikian, evaluasi dapat menghubungkan data kuantitatif dengan penjelasan dari unit pengampu. Namun, kualitas analisis tetap bergantung pada ketepatan angka, kelengkapan eviden, konsistensi data antardokumen, dan kejelasan tindak lanjut yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Hal ini terlihat, antara lain, pada perlunya klarifikasi perbedaan angka IKM dalam dashboard dan laporan survei, serta belum dicantumkannya kendala dan rencana aksi pada indikator IPA.

Secara keseluruhan, tantangan pengendalian pada Triwulan IV adalah mempertahankan capaian indikator yang telah memenuhi target sekaligus memperbaiki indikator yang masih berada di bawah target. Tindak lanjut harus disusun berdasarkan kendala yang telah teridentifikasi, karakteristik pengukuran masing-masing indikator, dan data pendukung yang dapat diverifikasi. Dengan

demikian, hasil monitoring melalui MOTOR KINETIS dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Tahun 2026.

B. Analisis Kinerja Kepaniteraan

1. Analisis Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator penyelesaian perkara secara tepat waktu merupakan salah satu ukuran penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi peradilan. Pencapaian indikator ini berkaitan dengan penyelesaian perkara sesuai standar waktu yang berlaku. Oleh karena itu, evaluasi perlu memperhatikan realisasi pada setiap periode pengukuran sekaligus kondisi penanganan perkara yang menjadi dasar penghitungan indikator.

Berdasarkan data Triwulan III Tahun 2026, realisasi penyelesaian perkara tepat waktu tercatat sebesar 100% pada Juli, 50% pada Agustus, dan 100% pada September. Rata-rata realisasi selama triwulan tersebut mencapai 83,33%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 91%. Dengan capaian terhadap target sebesar 91,58%, indikator ini belum mencapai target kinerja.

Variasi realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian pada Juli dan September belum sepenuhnya mengimbangi penurunan yang terjadi pada Agustus. Oleh karena itu, evaluasi tidak cukup dilakukan dengan melihat capaian bulan terakhir, tetapi perlu menelaah kondisi yang memengaruhi penghitungan realisasi sepanjang triwulan.

Berdasarkan keterangan unit pengampu yang dicatat melalui MOTOR KINETIS, salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN-SRG. Menurut penjelasan tersebut, perkara telah diserahkan kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diputus sejak tanggal 26 Februari 2026. Dalam proses penanganannya terdapat sejumlah tahapan, antara lain pemanggilan pihak tergugat, pemeriksaan permohonan intervensi, proses pembuktian, pemeriksaan setempat, dan pemberian kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas serta menyusun kesimpulan.

Penjelasan unit menyebutkan bahwa pihak tergugat mengajukan permohonan intervensi yang kemudian ditetapkan melalui penetapan majelis hakim tanggal 29 April 2026. Pada tahap pembuktian, terdapat permohonan pemeriksaan setempat yang beberapa kali diajukan, dan pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026. Selanjutnya, pada tahap pembuktian

terakhir, para pihak menyampaikan kebutuhan waktu tambahan untuk memeriksa berkas dan menyusun kesimpulan. Majelis hakim kemudian memberikan tambahan waktu lebih dari satu minggu dan menjadwalkan persidangan berikutnya pada tanggal 28 Juli 2026.

Rangkaian tersebut memberikan konteks faktual bagi evaluasi penanganan perkara. Namun, keterangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh variasi capaian Agustus disebabkan oleh perkara tersebut. Hubungan antara perkara yang dijelaskan unit pengampu dan penurunan realisasi bulanan tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan data perkara dan metode penghitungan indikator. Selain itu, evaluasi harus tetap menghormati kewenangan majelis hakim dalam mengelola dan memutus perkara.

Pencatatan kendala pada MOTOR KINETIS memberikan nilai tambah karena penjelasan operasional unit pengampu dapat ditelaah bersama data capaian. Informasi tersebut membantu memperjelas konteks penanganan perkara, tetapi tetap memerlukan verifikasi terhadap data pengukuran agar kesimpulan evaluasi tidak melampaui bukti yang tersedia.

Tindak lanjut pada Triwulan IV diarahkan pada:

1) Memeriksa data perkara yang menjadi dasar penghitungan realisasi penyelesaian perkara tepat waktu.
2) Memastikan kesesuaian jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang menjadi objek pengukuran.
3) Memantau perkembangan perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
4) Memperkuat koordinasi antara pimpinan, majelis hakim, dan kepaniteraan tanpa mencampuri kewenangan yudisial.
5) Memastikan penjelasan kendala dan tindak lanjut yang relevan terdokumentasi secara memadai melalui MOTOR KINETIS.

Dengan demikian, indikator penyelesaian perkara tepat waktu perlu menjadi salah satu fokus pengendalian Triwulan IV. Perbaikan diarahkan pada validasi data, peningkatan konsistensi capaian, pemantauan perkembangan perkara, dan penggunaan informasi kendala secara proporsional dalam evaluasi kinerja.

2. Analisis Ketepatan Waktu Penyediaan dan Pengiriman Salinan Putusan

Indikator penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu memiliki target sebesar 100% dan mencatat realisasi 100% pada Juli, Agustus, dan September. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target indikator telah terpenuhi secara konsisten selama Triwulan III.

Ketepatan waktu penyediaan dan pengiriman salinan putusan mendukung kepastian administrasi perkara dan pemenuhan hak para pihak untuk memperoleh dokumen putusan sesuai ketentuan. Capaian ini perlu dipertahankan melalui ketertiban administrasi dan pengendalian terhadap proses penyampaian dokumen.

Walaupun realisasi telah mencapai 100%, validitas capaian tetap harus didukung oleh kesesuaian antara jumlah putusan yang menjadi objek pengukuran dan jumlah salinan putusan yang diproses tepat waktu. Bukti administrasi serta pencatatan tanggal penyampaian perlu dipelihara agar hasil pengukuran dapat ditelusuri.

Pada Triwulan IV, pengendalian diarahkan pada pemeliharaan ketertiban administrasi, pencatatan waktu penyampaian, serta pemeriksaan berkala atas data dan bukti pendukung. MOTOR KINETIS dapat dimanfaatkan untuk memantau capaian indikator, sedangkan dokumen administrasi tetap menjadi dasar verifikasi atas realisasi yang dilaporkan.

3. Analisis Ketepatan Waktu Pengiriman Pemberitahuan Petikan atau Amar Putusan

Realisasi indikator pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali mencapai 100% pada Juli, Agustus, dan September. Data yang dilaporkan menunjukkan kesesuaian antara jumlah putusan yang menjadi objek pengukuran dan jumlah pemberitahuan yang disampaikan tepat waktu.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa target pelayanan administrasi perkara telah terpenuhi secara konsisten, termasuk pada September ketika jumlah putusan yang dilaporkan meningkat. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui pengendalian terhadap pencatatan tanggal penerimaan putusan, proses penyampaian pemberitahuan, dan kelengkapan bukti administrasi.

Pada Triwulan IV, MOTOR KINETIS dapat digunakan untuk memantau perkembangan capaian bulanan, sedangkan verifikasi tetap perlu dilakukan

terhadap dokumen sumber dan bukti penyampaian. Dengan demikian, realisasi 100% tidak hanya tercatat pada dashboard, tetapi juga didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Analisis Publikasi Putusan pada Direktori Putusan

Indikator publikasi putusan pada Direktori Putusan mencapai realisasi 100% selama Triwulan III. Seluruh putusan yang menjadi objek pengukuran pada periode tersebut tercatat telah diunggah pada Direktori Putusan.

Capaian ini menunjukkan terpenuhinya target indikator keterbukaan informasi putusan dalam periode yang dilaporkan. Publikasi putusan mendukung kemudahan akses informasi dan transparansi penyelenggaraan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Walaupun target telah tercapai, pengendalian tetap perlu memastikan bahwa dokumen yang diunggah sesuai dengan putusan yang telah diminutasi, kelengkapan dokumen telah diperiksa, dan tidak terdapat putusan yang tertinggal dalam proses unggah. Pemeriksaan berkala perlu dilakukan terhadap kesesuaian data pada dashboard dan dokumen sumber.

Pada Triwulan IV, MOTOR KINETIS dapat membantu pemantauan capaian indikator, sedangkan pemeriksaan dokumen dan data pada sistem publikasi menjadi dasar untuk memastikan keakuratan realisasi. Dengan cara tersebut, ketercapaian target dapat dipertahankan sekaligus mendukung kualitas keterbukaan informasi peradilan.

5. Analisis Penyelesaian Permohonan Eksekusi

Indikator penyelesaian permohonan eksekusi memiliki target sebesar 90%. Pada Triwulan III, terdapat satu permohonan eksekusi yang tercatat pada Agustus dan permohonan tersebut diselesaikan dengan realisasi 100%. Sementara itu, Juli dan September tercatat tidak memiliki permohonan yang menjadi objek pengukuran.

Karakteristik indikator ini berbeda dari indikator pelayanan perkara lainnya karena realisasinya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya permohonan eksekusi pada periode pengukuran. Oleh karena itu, periode tanpa permohonan tidak dapat langsung dinilai sebagai kegagalan pencapaian target.

Pada September, MOTOR KINETIS juga mencatat keterangan kendala bahwa tidak terdapat permohonan pengawasan eksekusi pada bulan tersebut. Keterangan ini memberikan konteks atas tidak adanya realisasi yang dapat dihitung pada periode bersangkutan. Dengan demikian, penilaian perlu membedakan antara kondisi tidak adanya permohonan dan kondisi adanya permohonan yang belum selesai diproses.

Tindak lanjut pada Triwulan IV diarahkan pada pemantauan status setiap permohonan yang masuk, ketertiban pencatatan, dan penyediaan bukti administrasi yang mendukung penghitungan realisasi. Pemanfaatan MOTOR KINETIS untuk mencatat keterangan periode tanpa permohonan membantu menjelaskan kondisi indikator, sehingga interpretasi capaian dapat dilakukan secara lebih proporsional.

6. Analisis Pemanfaatan e-Court

Indikator penggunaan e-Court mencapai realisasi 100% pada Juli, Agustus, dan September. Seluruh perkara yang menjadi objek pengukuran pada periode tersebut tercatat menggunakan e-Court, meskipun jumlah perkara berbeda pada setiap bulan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa target pemanfaatan layanan administrasi perkara secara elektronik telah terpenuhi selama Triwulan III. Hal ini mendukung modernisasi administrasi peradilan dan peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi informasi.

Pemeliharaan capaian tetap memerlukan pengendalian terhadap ketepatan pencatatan perkara, kesesuaian data pada sistem, dan kelengkapan dokumen pendukung. Data yang dicatat dalam MOTOR KINETIS perlu secara berkala dicocokkan dengan sumber data perkara untuk memastikan bahwa persentase penggunaan e-Court dihitung berdasarkan objek pengukuran yang benar.

Dengan demikian, prioritas Triwulan IV adalah mempertahankan tingkat pemanfaatan e-Court, memastikan keandalan data, dan melanjutkan pengawasan terhadap proses administrasi perkara elektronik.

7. Kesimpulan Analisis Kinerja Kepaniteraan

Secara keseluruhan, kinerja kepaniteraan pada Triwulan III menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pelayanan administrasi perkara telah mencapai target. Capaian 100% pada indikator pengiriman salinan putusan, pemberitahuan

petikan atau amar putusan, publikasi putusan, dan penggunaan e-Court perlu dipertahankan melalui pengendalian administrasi yang konsisten.

Sementara itu, indikator penyelesaian perkara tepat waktu masih memerlukan perhatian karena rata-rata realisasinya berada di bawah target. Penjelasan unit pengampu yang dicatat dalam MOTOR KINETIS memberikan konteks tambahan mengenai salah satu perkara yang menjadi perhatian, tetapi hubungan antara kasus tersebut dan penurunan capaian Agustus tetap perlu diverifikasi melalui data pengukuran. Indikator penyelesaian permohonan eksekusi juga perlu dipantau sesuai dengan keberadaan permohonan pada setiap periode.

Penggunaan MOTOR KINETIS membantu menghubungkan angka capaian dengan keterangan unit pengampu. Agar manfaat tersebut optimal, data, kendala, dan tindak lanjut yang dicatat perlu didukung oleh dokumen sumber dan diperbarui secara konsisten.

C. Analisis Capaian Kinerja Kepuasan dan Kepercayaan Publik

1. Analisis Pencapaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Berdasarkan monitoring Triwulan III Tahun 2026, indikator kepuasan pengguna layanan pengadilan mencatat realisasi sebesar 99,09, dengan target 98,00 dan capaian terhadap target sebesar 101,11%. Realisasi tersebut dihitung berdasarkan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,60 dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 99,57, sebagaimana tercantum dalam dashboard MOTOR KINETIS.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator kepuasan pengguna layanan telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, capaian kuantitatif perlu diikuti dengan evaluasi substantif untuk memastikan bahwa penilaian yang positif tersebut menjadi dasar pemeliharaan dan peningkatan mutu pelayanan.

Eviden yang diunggah pada MOTOR KINETIS berupa Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan III Tahun 2026 untuk periode Juli–September. Laporan tersebut memuat hasil penilaian terhadap sembilan unsur pelayanan dan lima unsur persepsi antikorupsi. Pada aspek pelayanan, nilai rata-rata tertinggi tercatat sebesar 3,96 dari skala 4 pada unsur kesesuaian persyaratan, kompetensi petugas, perilaku petugas, serta kualitas sarana dan prasarana. Sementara itu, unsur kewajaran biaya atau tarif

memperoleh nilai rata-rata 3,88, yang merupakan nilai terendah di antara unsur pelayanan yang dilaporkan.

Nilai tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan aspek pelayanan yang telah memperoleh penilaian tinggi dan menelaah unsur yang masih memiliki ruang peningkatan. Nilai kewajaran biaya atau tarif yang relatif lebih rendah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya permasalahan biaya atau pelanggaran. Penafsiran lebih lanjut perlu mempertimbangkan konteks pertanyaan survei, distribusi jawaban, dan kondisi pelayanan yang sebenarnya.

Pada aspek persepsi antikorupsi, laporan survei menunjukkan penilaian yang sangat positif pada unsur nondiskriminasi pelayanan, tidak adanya pelayanan di luar prosedur, tidak adanya penerimaan imbalan di luar ketentuan, tidak adanya pungutan liar, serta tidak adanya percaloan. Hasil tersebut merupakan informasi positif yang perlu dipertahankan melalui konsistensi penerapan standar pelayanan dan penguatan integritas aparatur.

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan eviden tersebut. Pertama, dashboard MOTOR KINETIS mencantumkan IKM sebesar 98,60, sedangkan laporan survei memuat nilai persentase SKM sebesar 98,48% dan nilai SKM sebesar 3,94 pada skala 4. Perbedaan tersebut perlu diklarifikasi kepada penanggung jawab untuk memastikan kesesuaian dasar penghitungan dan konversi nilai. Sampai terdapat penjelasan lebih lanjut, perhitungan realisasi indikator tetap mengacu pada angka yang digunakan dalam dashboard, dengan catatan bahwa konsistensi data antardokumen perlu diperiksa.

Kedua, laporan survei memuat rekomendasi agar pelayanan yang telah dinilai baik tetap dipertahankan dan kualitas sarana serta prasarana ditingkatkan. Namun, pada bagian tindak lanjut hasil survei tercantum keterangan "Nihil". Hal ini menunjukkan bahwa dokumentasi tindak lanjut perlu diperjelas. Keterangan tersebut belum membuktikan bahwa tindak lanjut sama sekali tidak dilakukan, tetapi belum memberikan informasi yang cukup untuk menelusuri pelaksanaan rekomendasi.

Dengan dukungan eviden tersebut, evaluasi pada Triwulan IV perlu diarahkan pada:

1) Mempertahankan standar pelayanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2) Menelaah unsur pelayanan yang masih memiliki ruang peningkatan, termasuk sarana dan prasarana.
3) Memanfaatkan hasil IKM dan IPAK sebagai bahan evaluasi mutu pelayanan dan integritas.
4) Mengklarifikasi perbedaan angka IKM pada dashboard dan laporan survei agar konsistensi data terjaga.
5) Mendokumentasikan tindak lanjut atas rekomendasi survei beserta bukti pelaksanaannya.

MOTOR KINETIS memberikan manfaat karena eviden survei dapat ditautkan dengan indikator yang dinilai, sehingga hasil pengukuran tidak hanya berupa angka pada dashboard. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal apabila data yang ditampilkan konsisten dengan dokumen sumber dan rekomendasi survei diikuti dengan pencatatan tindak lanjut yang dapat diverifikasi.

2. Analisis Keberlanjutan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak hanya berkaitan dengan nilai survei, tetapi juga dengan konsistensi pelaksanaan pelayanan, transparansi informasi, kepastian prosedur, dan integritas aparatur. Oleh karena itu, capaian indeks yang telah melampaui target perlu diikuti dengan pemeliharaan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Hasil SKM dan SPAK Triwulan III memberikan gambaran positif mengenai persepsi responden terhadap pelayanan dan integritas. Namun, hasil survei merupakan salah satu instrumen evaluasi dan tidak dapat dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek pelayanan telah bebas dari kelemahan. Masukan responden, rekomendasi perbaikan, dan bukti tindak lanjut tetap perlu diperhatikan.

Dalam konteks pengendalian kinerja, MOTOR KINETIS membantu menghubungkan nilai indeks dengan eviden survei yang diunggah oleh penanggung jawab indikator. Hal ini meningkatkan keterlacakan dokumen pendukung dan memudahkan pemeriksaan oleh pimpinan. Meskipun demikian, ketersediaan dokumen saja belum cukup apabila tindak lanjut yang diperlukan belum dijelaskan atau belum didokumentasikan secara memadai.

Pada Triwulan IV, pengendalian perlu diarahkan pada pemeliharaan standar pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana sesuai hasil evaluasi, pemantauan pengaduan dan masukan masyarakat, serta pelengkapan dokumentasi

tindak lanjut hasil survei. Dengan cara tersebut, capaian indeks yang baik dapat disertai upaya peningkatan pelayanan yang terukur dan berkelanjutan.

3. Kesimpulan Analisis Kepuasan dan Kepercayaan Publik

Indikator kepuasan pengguna layanan pengadilan telah melampaui target, dengan realisasi dashboard sebesar 99,09 dan capaian terhadap target sebesar 101,11%. Eviden SKM dan SPAK yang diunggah pada MOTOR KINETIS menunjukkan penilaian positif terhadap berbagai unsur pelayanan dan persepsi antikorupsi.

Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk mengklarifikasi perbedaan angka IKM pada dashboard dan laporan survei serta memperjelas dokumentasi tindak lanjut rekomendasi survei. Oleh karena itu, prioritas pengendalian Triwulan IV adalah mempertahankan mutu pelayanan, meningkatkan aspek yang masih memiliki ruang perbaikan, menjaga integritas aparatur, dan memastikan hasil survei dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan yang dapat ditelusuri.

D. Analisis Capaian Kinerja Kesekretariatan

1. Analisis Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

IP ASN pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 83,02 dari target 81,00, dengan capaian terhadap target sebesar 102,49%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator profesionalitas aparatur telah melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan rincian komponen dalam formulir monitoring, nilai kualifikasi tercatat sebesar 23,29, kompetensi sebesar 31,59, kinerja sebesar 24,29, dan disiplin sebesar 5,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan selama Juli sampai dengan September.

Capaian IP ASN yang melampaui target merupakan kondisi positif dalam pengelolaan sumber daya manusia. Namun, nilai yang tetap selama tiga bulan belum cukup untuk membuktikan adanya peningkatan profesionalitas selama periode tersebut. Evaluasi perlu membedakan antara pencapaian nilai indikator dan perkembangan nyata kapasitas aparatur.

Pada Triwulan IV, tindak lanjut diarahkan pada pemeliharaan validitas data kepegawaian, pemantauan pemenuhan kompetensi, evaluasi kinerja pegawai, serta

penguatan disiplin aparatur. Data dan eviden yang digunakan dalam penghitungan perlu tetap dipelihara agar capaian yang dilaporkan dapat diverifikasi.

Dengan pendekatan tersebut, capaian IP ASN yang telah melampaui target dapat dipertahankan dan dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2. Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA-01

IKPA DIPA-01 pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 98,53 dari target 96,00, atau sebesar 102,64% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini telah melampaui sasaran kinerja yang ditetapkan.

Meskipun telah melampaui target, nilai IKPA mengalami penurunan dari 99,84 pada Juli menjadi 98,74 pada Agustus dan 98,53 pada September. Penurunan tersebut perlu dicermati agar capaian yang telah baik dapat dipertahankan sampai dengan akhir tahun.

Berdasarkan rincian komponen penilaian, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, dan capaian output tercatat sebesar 100,00 selama periode yang dilaporkan. Penyerapan anggaran meningkat dari 99,20 pada Juli menjadi 99,74 pada September, sedangkan pengelolaan UP dan TUP berada pada nilai yang mendekati 100,00. Di sisi lain, deviasi Halaman III DIPA menurun dari 100,00 pada Juli menjadi 90,52 pada September.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator secara keseluruhan tetap berada di atas target, tetapi beberapa komponen perlu dipantau agar tidak menimbulkan penurunan lebih lanjut. Tanpa pemeriksaan terhadap mekanisme pembobotan dan penghitungan, penurunan nilai IKPA keseluruhan tidak dapat dinyatakan hanya disebabkan oleh satu komponen tertentu.

Pada Triwulan IV, pengendalian perlu diarahkan pada pemantauan deviasi perencanaan, pemeriksaan kesesuaian jadwal kegiatan dengan rencana penarikan dana, serta verifikasi administrasi pelaksanaan anggaran. Data pada MOTOR KINETIS dapat menjadi ringkasan pemantauan, sedangkan dokumen pelaksanaan anggaran dan data sumber tetap menjadi dasar untuk memeriksa kesesuaian nilai yang dilaporkan.

Dengan demikian, IKPA DIPA-01 perlu dipertahankan melalui pengendalian rutin, pemantauan komponen penilaian, dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

3. Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA-05

IKPA DIPA-05 pada Triwulan III mencapai 89,29 dari target 95,00, atau sebesar 94,00% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini belum mencapai sasaran yang ditetapkan dan perlu menjadi salah satu prioritas pengendalian pada Triwulan IV.

Rincian komponen penilaian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran meningkat dari 76,21 pada Juli menjadi 80,72 pada September. Capaian output juga meningkat dari 63,89 pada Juli menjadi 95,93 pada September. Perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan pada kedua komponen selama periode monitoring. Revisi DIPA dan penyelesaian tagihan juga tercatat sebesar 100,00 pada setiap bulan.

Namun, komponen deviasi Halaman III DIPA menurun dari 87,13 pada Agustus menjadi 71,70 pada September. Pengelolaan UP dan TUP juga menurun dari 95,66 pada Agustus menjadi 94,84 pada September. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pada beberapa komponen belum diikuti perkembangan yang konsisten pada seluruh komponen penilaian.

Berdasarkan keterangan kendala yang disampaikan penanggung jawab melalui MOTOR KINETIS, nilai IKPA DIPA-05 yang masih berada di bawah target terutama menjadi perhatian pada komponen deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Unit pengampu menjelaskan perlunya meningkatkan kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran serta mengoptimalkan penyerapan sesuai jadwal kegiatan yang telah direncanakan.

Sebagai tindak lanjut, penanggung jawab indikator menyampaikan bahwa langkah korektif dilakukan melalui pengajuan revisi pengurangan anggaran terhadap sisa pagu kegiatan yang diperkirakan sulit direalisasikan, khususnya anggaran sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan. Langkah ini bertujuan menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan kemampuan realisasi satuan kerja, sekaligus meningkatkan kesesuaian rencana penarikan dana dengan kondisi pelaksanaan anggaran.

Pengendalian pada Triwulan IV perlu diarahkan pada pemantauan proses revisi, penyesuaian rencana penarikan dana, dan percepatan realisasi anggaran yang masih memungkinkan dilaksanakan sesuai ketentuan. Pelaksanaan tindak lanjut perlu didokumentasikan agar perkembangan perbaikan dapat ditelusuri dan dampaknya terhadap komponen IKPA dapat dievaluasi.

Dengan demikian, IKPA DIPA-05 belum mencapai target pada Triwulan III. Perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan penjelasan kendala dan rencana aksi yang telah dicatat pada MOTOR KINETIS sebagai dasar pengendalian, tanpa mengabaikan pemeriksaan terhadap data dan ketentuan pelaksanaan anggaran.

4. Analisis Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01

NKPA DIPA-01 pada Triwulan III tercatat sebesar 81,25 dari target 96,00, dengan capaian terhadap target sebesar 84,64%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja perencanaan anggaran belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan rincian komponen yang dicatat pada MOTOR KINETIS, capaian kinerja Rincian Output (RO) tercatat sebesar 75,00, sedangkan penggunaan SBK dan efisiensi SBK masing-masing mencapai 100,00. Nilai komponen tersebut tidak mengalami perubahan selama Juli sampai dengan September.

Berdasarkan keterangan kendala yang disampaikan penanggung jawab indikator melalui MOTOR KINETIS, capaian RO sebesar 75,00 terutama dipengaruhi oleh masih adanya RO yang pelaksanaannya berlangsung secara bertahap atau *on progress*, antara lain RO Layanan Operasional Kantor yang memiliki volume target satu layanan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran capaian RO dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan secara proporsional terhadap tahapan pelaksanaan, sehingga pada Triwulan III capaian belum mencapai 100,00.

Penjelasan tersebut memberikan konteks atas nilai capaian RO yang dilaporkan. Oleh karena itu, nilai 75,00 tidak dapat langsung diartikan sebagai bukti bahwa kegiatan tidak terlaksana atau bahwa anggaran tidak terserap secara optimal. Evaluasi perlu mempertimbangkan karakteristik output, tahapan pelaksanaan, target volume, serta mekanisme pengukuran yang digunakan.

Sementara itu, penggunaan SBK dan efisiensi SBK masing-masing telah mencapai 100,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua komponen efisiensi telah mencapai nilai maksimal sebagaimana tercatat dalam formulir. Dengan demikian, perhatian utama diarahkan pada pemantauan penyelesaian RO yang masih berjalan dan kesesuaian data realisasi dengan perkembangan pelaksanaan yang sebenarnya.

Penanggung jawab indikator telah merencanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan RO yang masih berlangsung, khususnya Layanan Operasional Kantor, untuk memastikan seluruh tahapan dan target dapat diselesaikan sesuai rencana hingga akhir Tahun Anggaran 2026. Selain itu, kelengkapan dan pemutakhiran data realisasi RO perlu dipastikan agar sesuai dengan progres pelaksanaan yang sebenarnya.

MOTOR KINETIS memberikan manfaat dalam mendokumentasikan kendala dan rencana aksi tersebut sehingga tindak lanjut dapat ditelusuri. Pada Triwulan IV, hasil pemantauan perlu digunakan untuk menilai perkembangan RO dan menentukan apakah terdapat perubahan capaian yang berdampak pada nilai NKPA.

Dengan demikian, NKPA DIPA-01 perlu dikendalikan melalui pemantauan penyelesaian RO, validasi data realisasi, serta pemeliharaan capaian optimal pada komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK.

5. Analisis Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05

NKPA DIPA-05 tercatat sebesar 41,19 dari target 91,00, dengan capaian terhadap target sebesar 45,26%. Kesenjangan tersebut merupakan salah satu yang terbesar di antara indikator kesekretariatan, sehingga memerlukan perhatian lebih intensif pada Triwulan IV.

Berdasarkan tampilan terbaru pada MOTOR KINETIS, komponen capaian Rincian Output (CRO) tercatat sebesar 41,58, komponen penggunaan SBK sebesar 100,00, dan komponen efisiensi SBK sebesar 0,00. Nilai NKPA yang dilaporkan adalah 41,19. Data komponen tersebut perlu digunakan secara konsisten dalam analisis dan pemeriksaan dokumen sumber.

Berdasarkan penjelasan kendala yang disampaikan penanggung jawab indikator, nilai CRO belum optimal karena sebagian besar Rincian Output memiliki karakteristik pelaksanaan kegiatan yang berlangsung secara berkala sepanjang tahun dan bersifat *demand-driven*, yaitu mengikuti kebutuhan kegiatan. Penanggung jawab juga menjelaskan bahwa pelaporan realisasi volume RO dilakukan secara penuh setelah seluruh tahapan kegiatan operasional tahun berjalan selesai dilaksanakan.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pelaksanaan dan pelaporan output menjadi konteks penting dalam mengevaluasi nilai CRO. Namun, penjelasan ini tidak menghilangkan kebutuhan untuk memantau realisasi masing-

masing RO dan memastikan bahwa volume fisik yang telah terlaksana dicatat secara tepat waktu. Nilai CRO tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai persentase penyerapan anggaran atau persentase kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Selain itu, komponen efisiensi SBK yang tercatat sebesar 0,00 perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan data pendukung dan mekanisme penghitungan yang berlaku. Informasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan penyebab nilai tersebut. Oleh karena itu, analisis komponen efisiensi harus dilakukan melalui pemeriksaan data yang relevan sebelum menetapkan kesimpulan mengenai faktor yang memengaruhi nilai akhir NKPA.

Sebagai tindak lanjut, penanggung jawab indikator telah merencanakan percepatan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah terlaksana agar target volume output dapat segera diinput secara penuh pada akhir tahun anggaran. Selain itu, pemantauan dan pemutakhiran data realisasi volume fisik akan dilakukan secara berkala melalui aplikasi Monev DJA/SMART untuk mendukung akumulasi nilai CRO satuan kerja secara optimal pada penutupan tahun anggaran.

Tindak lanjut tersebut perlu disertai pemeriksaan kesesuaian antara realisasi fisik dan data yang dilaporkan, pemantauan terhadap RO yang belum mencapai target, serta koordinasi dengan unit pelaksana kegiatan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban. Data yang diperbarui pada aplikasi terkait perlu dicocokkan dengan dokumen sumber agar perbaikan nilai benar-benar mencerminkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

MOTOR KINETIS memberikan manfaat dengan menyediakan ruang bagi pengampu untuk menjelaskan karakteristik pelaksanaan RO dan mencatat rencana aksi. Dengan demikian, nilai NKPA yang rendah dapat dianalisis bersama konteks pelaksanaan dan langkah perbaikan. Namun, efektivitas tindak lanjut baru dapat dinilai setelah terdapat pembaruan data dan bukti pelaksanaan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, NKPA DIPA-05 perlu menjadi prioritas pengendalian pada Triwulan IV. Fokus perbaikan diarahkan pada penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban, pemutakhiran data volume fisik secara berkala, validasi komponen CRO, serta penelaahan komponen efisiensi SBK agar capaian akhir tahun didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Analisis Indikator Pengelolaan Aset

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) mencapai nilai 2,67 dari target 3,00, atau sebesar 89,00% terhadap target. Dengan demikian, indikator pengelolaan aset belum mencapai sasaran yang ditetapkan.

Rincian komponen penilaian menunjukkan bahwa penatausahaan BMN memperoleh nilai 2,50, realisasi PNBP dari pengelolaan aset sebesar 2,75, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 2,60, pengawasan dan pengendalian BMN sebesar 2,70, serta administrasi BMN sebesar 2,83. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat komponen yang belum mencapai nilai maksimal.

Namun, berdasarkan informasi yang tersedia pada MOTOR KINETIS, penanggung jawab indikator IPA belum mencantumkan keterangan kendala atau faktor penghambat maupun rencana aksi atau solusi perbaikan. Oleh karena itu, penyebab belum optimalnya capaian IPA belum dapat dipastikan berdasarkan data monitoring yang tersedia. Belum dicantumkannya informasi tersebut juga tidak dapat langsung diartikan bahwa evaluasi atau tindak lanjut sama sekali belum dilakukan; yang dapat dipastikan adalah bahwa dokumentasinya belum tersedia dalam aplikasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi IPA perlu diawali dengan pemeriksaan rincian komponen penilaian dan dokumen pendukung untuk mengidentifikasi aspek yang memengaruhi nilai 2,67. Pemeriksaan dapat mencakup data penatausahaan BMN, pengelolaan PNBP aset, kepatuhan terhadap ketentuan, serta bukti pengawasan dan pengendalian sesuai komponen yang dinilai.

Pada Triwulan IV, penanggung jawab indikator perlu melengkapi keterangan kendala berdasarkan hasil evaluasi dan menyusun rencana aksi yang sesuai dengan kondisi faktual. Setiap rencana aksi hendaknya memuat langkah yang jelas, dapat dipantau, dan didukung bukti pelaksanaan. MOTOR KINETIS dapat digunakan untuk mendokumentasikan hasil evaluasi tersebut sehingga tindak lanjutnya dapat ditelusuri oleh pimpinan.

Dengan demikian, IPA masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi pencapaian nilai maupun kelengkapan informasi monitoring. Prioritas tindak lanjut adalah mengidentifikasi komponen yang belum optimal, melengkapi dokumentasi kendala dan rencana aksi, serta memantau pelaksanaan perbaikan berdasarkan bukti yang tersedia.

7. Kesimpulan Analisis Kinerja Kesekretariatan

Secara keseluruhan, capaian kinerja kesekretariatan pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa IP ASN dan IKPA DIPA-01 telah melampaui target, sedangkan IKPA DIPA-05, NKPA DIPA-01, NKPA DIPA-05, dan IPA masih memerlukan penguatan pengendalian.

IKPA DIPA-05 memerlukan penyesuaian rencana penarikan dana dan pengendalian realisasi anggaran berdasarkan kendala yang telah disampaikan. NKPA DIPA-01 memerlukan pemantauan penyelesaian RO yang masih berlangsung secara bertahap. NKPA DIPA-05 memerlukan percepatan penyelesaian administrasi dan pemutakhiran data volume fisik, disertai penelaahan komponen efisiensi SBK. Sementara itu, IPA memerlukan evaluasi komponen penilaian serta pelengkapan keterangan kendala dan rencana aksi oleh penanggung jawab indikator.

Dari sisi tata kelola, MOTOR KINETIS memberikan nilai tambah dalam proses monitoring karena data capaian dapat dilengkapi dengan keterangan kendala, rencana aksi, dan eviden pendukung. Hal ini membantu membedakan indikator yang sudah memiliki penjelasan operasional dari indikator yang masih memerlukan pelengkapan informasi. Namun, kualitas pengendalian tetap bergantung pada ketepatan data, konsistensi pembaruan, dan kedisiplinan unit pengampu dalam mendokumentasikan tindak lanjut.

Pengendalian pada Triwulan IV perlu didukung oleh koordinasi antarunit, pemantauan perkembangan indikator, validasi data, dan dokumentasi hasil tindak lanjut. Dengan demikian, perbaikan dapat dilaksanakan secara terarah dan menjadi dasar yang memadai bagi evaluasi capaian kinerja pada akhir tahun.

E. Analisis Risiko dan Pengendalian Kinerja

1. Identifikasi Risiko Kinerja

Analisis risiko kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian target Perjanjian Kinerja PTUN Serang sampai dengan akhir Tahun 2026. Identifikasi ini didasarkan pada kesenjangan antara target dan realisasi, variasi capaian selama periode monitoring, karakteristik indikator, serta kendala dan rencana aksi yang disampaikan unit pengampu melalui MOTOR KINETIS.

Risiko dalam bagian ini merupakan identifikasi atas kemungkinan dampak dari kondisi capaian yang tercatat. Risiko tersebut tidak dengan

sendirinya membuktikan bahwa suatu permasalahan telah terjadi. Penetapan penyebab secara lebih terperinci tetap memerlukan pemeriksaan terhadap data pendukung dan kondisi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil monitoring Triwulan III, area risiko yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut.

No.	Area kinerja	Kondisi yang teridentifikasi	Risiko terhadap pencapaian kinerja
1	Penyelesaian perkara tepat waktu	Rata-rata realisasi 83,33%, sedangkan target 91%; terdapat penjelasan unit terkait salah satu perkara yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.	Target berisiko tidak tercapai apabila kesenjangan capaian dan konsistensi penyelesaian tidak dikendalikan.
2	IKPA DIPA-05	Realisasi 89,29 dari target 95; deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran masih memerlukan perhatian.	Target berisiko tidak tercapai apabila penyesuaian rencana dan pelaksanaan anggaran tidak berjalan efektif.
3	NKPA DIPA-01	Realisasi 81,25 dari target 96; capaian RO sebesar 75,00 karena masih terdapat RO yang berlangsung secara bertahap.	Kesenjangan terhadap target dapat berlanjut apabila penyelesaian RO dan pemutakhiran data tidak dipantau.
4	NKPA DIPA-05	Realisasi 41,19 dari target 91; CRO sebesar 41,58 dan efisiensi SBK sebesar 0,00 pada dashboard terbaru.	Risiko pencapaian target tinggi karena kesenjangan besar dan komponen tertentu memerlukan penelaahan lebih lanjut.
5	Indikator Pengelolaan Aset	Realisasi 2,67 dari target 3; kendala dan rencana aksi belum dicantumkan dalam MOTOR KINETIS.	Perbaikan sulit diarahkan secara spesifik apabila penyebab dan rencana aksi belum didokumentasikan.

6	IKPA DIPA-01	Realisasi 98,53 dari target 96, tetapi nilai menurun selama Juli–September.	Nilai yang telah melampaui target berpotensi menurun apabila kualitas pelaksanaan anggaran tidak dipertahankan.
7	Kepuasan pengguna layanan	Realisasi 99,09 dari target 98; terdapat perbedaan angka IKM antara dashboard dan laporan survei serta dokumentasi tindak lanjut survei perlu diperjelas.	Konsistensi data dan keterlacakan tindak lanjut dapat terganggu apabila perbedaan data dan dokumentasi tidak diklarifikasi.

Berdasarkan identifikasi tersebut, NKPA DIPA-05 perlu memperoleh perhatian besar karena kesenjangan numeriknya terhadap target cukup tinggi. Penyelesaian perkara tepat waktu memerlukan penelaahan terhadap variasi capaian dan data perkara, sedangkan IKPA DIPA-05 memerlukan pengendalian pada perencanaan penarikan dana dan pelaksanaan anggaran.

Selain itu, kelengkapan dokumentasi pada IPA merupakan area pengendalian tersendiri. Belum tersedianya keterangan kendala dan rencana aksi membatasi kemampuan untuk menetapkan tindakan korektif yang spesifik. Pada indikator kepuasan pengguna layanan, risiko yang perlu dikendalikan bukan terutama pencapaian target, melainkan konsistensi angka dan keterlacakan tindak lanjut rekomendasi survei.

2. Analisis Prioritas Pengendalian

Prioritas pengendalian ditetapkan dengan mempertimbangkan besarnya kesenjangan terhadap target, karakteristik indikator, ketersediaan penjelasan kendala, dan peluang perbaikan yang masih memungkinkan sebelum akhir tahun. Penetapan prioritas ini merupakan rekomendasi manajerial berdasarkan data monitoring, bukan hasil penilaian risiko formal yang menggunakan seluruh parameter kemungkinan dan dampak.

- Prioritas utama: NKPA DIPA-05

Realisasi sebesar 41,19 dari target 91,00 atau 45,26% menunjukkan kesenjangan yang besar. Pengendalian perlu difokuskan pada pemutakhiran

data volume fisik, penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan, validasi CRO, serta penelaahan komponen efisiensi SBK.

- Prioritas tinggi: IKPA DIPA-05 dan NKPA DIPA-01

IKPA DIPA-05 mencapai 94,00% dari target, sedangkan NKPA DIPA-01 mencapai 84,64% dari target. Keduanya memerlukan pengendalian berdasarkan karakteristik masing-masing, yaitu penyesuaian rencana penarikan dana dan realisasi anggaran pada IKPA DIPA-05 serta pemantauan penyelesaian RO pada NKPA DIPA-01.

- Prioritas perbaikan: penyelesaian perkara tepat waktu dan IPA

Penyelesaian perkara tepat waktu mencatat rata-rata realisasi 83,33%, sedangkan IPA mencapai 89,00% dari target. Pada indikator perkara, evaluasi perlu menelaah data dan tahapan penanganan perkara yang relevan. Pada IPA, pengendalian perlu dimulai dari pemeriksaan komponen penilaian dan pelengkapan keterangan kendala serta rencana aksi.

- Prioritas pemeliharaan dan validasi: IP ASN, IKPA DIPA-01, dan kepuasan pengguna layanan

Indikator-indikator tersebut telah melampaui target. Pengendalian tetap diperlukan untuk mempertahankan mutu pelaksanaan, menjaga validitas data, mengklarifikasi perbedaan angka yang ditemukan, serta memastikan dokumentasi pendukung dan tindak lanjut tersedia.

Penetapan prioritas ini membantu mengarahkan sumber daya pengendalian Triwulan IV pada indikator yang paling membutuhkan perhatian tanpa mengabaikan pemeliharaan capaian indikator yang telah memenuhi target.

3. Strategi Pengendalian Kinerja

Berdasarkan hasil identifikasi risiko, strategi pengendalian kinerja pada Triwulan IV perlu dilaksanakan melalui beberapa pendekatan.

Pertama, pengendalian berbasis data dan eviden. Setiap unit penanggung jawab perlu memastikan bahwa target, realisasi, komponen pengukuran, dan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini penting bagi NKPA DIPA-01, NKPA DIPA-05, IPA, dan indikator

kepuasan pengguna layanan yang memerlukan penelaahan terhadap komponen atau konsistensi data.

Kedua, pengendalian berdasarkan kendala yang terverifikasi. Rencana aksi harus disusun sesuai kendala yang benar-benar ditemukan dan dijelaskan oleh unit pengampu. Pada penyelesaian perkara, analisis perlu mempertimbangkan data perkara dan tahapan penanganan. Pada IKPA DIPA-05, pengendalian perlu mengikuti rencana penyesuaian anggaran dan penarikan dana yang telah disampaikan. Pada NKPA, pemantauan perlu diarahkan pada RO dan mekanisme pengukurannya.

Ketiga, pelengkapan dokumentasi monitoring. MOTOR KINETIS menyediakan sarana untuk mencatat kendala, rencana aksi, dan eviden. Oleh karena itu, unit pengampu perlu memastikan kolom-kolom tersebut diisi secara relevan dan didukung bukti. Pada IPA, penanggung jawab perlu melengkapi keterangan kendala dan rencana aksi. Pada indikator kepuasan pengguna layanan, dokumentasi tindak lanjut rekomendasi survei perlu diperjelas.

Keempat, koordinasi antarunit. Indikator kinerja tidak seluruhnya berada dalam kendali satu petugas atau satu bagian. Koordinasi antara pimpinan, kepaniteraan, kesekretariatan, pengelola anggaran, pengelola perencanaan, dan pengelola BMN diperlukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kelima, pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Pelaksanaan tindak lanjut tidak cukup dinilai dari keberadaan rencana pada aplikasi. Perkembangan pelaksanaan, perubahan nilai indikator, dan bukti penyelesaian perlu diperiksa secara berkala. Apabila tindakan belum memberikan hasil yang diharapkan, unit terkait perlu menelaah kembali pendekatan yang digunakan.

Keenam, penguatan fungsi MOTOR KINETIS sebagai instrumen pengendalian. Informasi yang dicatat dalam aplikasi perlu dimanfaatkan dalam evaluasi pimpinan untuk menentukan prioritas, menelusuri kendala, dan menilai tindak lanjut. Manfaat tersebut akan optimal apabila data diperbarui secara tepat waktu, angka konsisten dengan dokumen sumber, dan penjelasan kendala tidak hanya bersifat umum tetapi menggambarkan kondisi yang relevan dengan indikator.

Melalui strategi tersebut, pengendalian kinerja diharapkan berjalan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitasnya tetap

perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan tindakan dan perkembangan capaian pada Triwulan IV.

F. Proyeksi Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Tahun 2026

1. Dasar Penyusunan Proyeksi

Proyeksi capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2026 disusun untuk memberikan gambaran mengenai indikator yang perlu dipertahankan, indikator yang memerlukan percepatan perbaikan, dan area yang harus menjadi fokus pengendalian pada Triwulan IV.

Proyeksi ini menggunakan realisasi Triwulan III, penjelasan kendala, rencana aksi, dan eviden yang tersedia pada MOTOR KINETIS sebagai dasar evaluasi. Karena realisasi Oktober sampai dengan Desember 2026 belum tercakup dalam data yang dianalisis, proyeksi tidak dimaksudkan sebagai kepastian nilai akhir tahun. Proyeksi berfungsi sebagai dasar penetapan prioritas pengendalian dan perlu diperbarui berdasarkan perkembangan realisasi berikutnya.

2. Proyeksi Kinerja Kepaniteraan

Pada bidang kepaniteraan, indikator pengiriman salinan putusan, pemberitahuan petikan atau amar putusan, publikasi putusan, dan penggunaan e-Court telah mencapai target 100% selama Triwulan III. Arah pengendalian pada Triwulan IV adalah mempertahankan konsistensi realisasi melalui pemantauan administrasi perkara, validasi data, dan kelengkapan bukti pendukung.

Indikator penyelesaian perkara tepat waktu memerlukan perhatian lebih lanjut karena rata-rata realisasinya sebesar 83,33% terhadap target 91%. Penjelasan unit pengampu mengenai salah satu perkara memberikan konteks bagi evaluasi, tetapi proyeksi akhir tahun tetap bergantung pada pemeriksaan data perkara, perkembangan penanganan, dan efektivitas pengendalian yang dilakukan.

Sementara itu, indikator penyelesaian permohonan eksekusi perlu dipantau berdasarkan jumlah permohonan yang masuk dan status penyelesaiannya. Proyeksi indikator ini tidak tepat ditentukan hanya berdasarkan nilai 100% pada Agustus karena Juli dan September tidak memiliki permohonan yang dapat dibandingkan secara langsung.

Dengan demikian, fokus proyeksi kinerja kepaniteraan adalah mempertahankan indikator yang telah mencapai target dan meningkatkan konsistensi penyelesaian perkara tepat waktu melalui pengendalian berbasis data.

3. Proyeksi Kinerja Kepuasan dan Kepercayaan Publik

Indikator kepuasan pengguna layanan pengadilan mencatat realisasi 99,09 terhadap target 98,00, dengan capaian terhadap target 101,11%. Hasil survei Triwulan III menunjukkan penilaian positif terhadap kualitas pelayanan dan persepsi antikorupsi.

Proyeksi Triwulan IV diarahkan pada pemeliharaan standar pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana sesuai hasil evaluasi, serta tindak lanjut masukan masyarakat. Selain itu, perbedaan angka IKM antara dashboard dan laporan survei perlu diklarifikasi agar data yang digunakan pada pelaporan akhir tahun konsisten. Dokumentasi tindak lanjut rekomendasi survei juga perlu diperjelas.

Proyeksi tidak dapat memastikan bahwa nilai indeks akan tetap sama karena hasil survei berikutnya dapat dipengaruhi oleh kondisi pelayanan dan mekanisme pengukuran pada periode tersebut. Oleh karena itu, evaluasi perlu didasarkan pada hasil pengukuran aktual dan tindak lanjut yang dapat dibuktikan.

4. Proyeksi Kinerja Kesekretariatan

Pada bidang kesekretariatan, IP ASN sebesar 83,02 dan IKPA DIPA-01 sebesar 98,53 telah melampaui target. Pengendalian kedua indikator tersebut berfokus pada pemeliharaan capaian, validasi data, dan konsistensi pelaksanaan tugas.

IKPA DIPA-05 masih memerlukan pengendalian terhadap deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Rencana revisi pengurangan anggaran terhadap sisa pagu kegiatan yang diperkirakan sulit direalisasikan perlu dipantau pelaksanaannya, disertai penyesuaian rencana penarikan dana dan percepatan realisasi anggaran yang masih dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

NKPA DIPA-01 memerlukan pemantauan terhadap RO yang masih berjalan secara bertahap, khususnya Layanan Operasional Kantor. Proyeksi

peningkatan capaian perlu didasarkan pada perkembangan RO dan data realisasi yang diperbarui sesuai pelaksanaan sebenarnya.

NKPA DIPA-05 menjadi prioritas karena realisasinya sebesar 41,19 masih jauh di bawah target 91. Tindak lanjut diarahkan pada percepatan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan, pemutakhiran volume fisik melalui Monev DJA/SMART, validasi CRO, dan penelaahan komponen efisiensi SBK yang tercatat 0,00.

Sementara itu, IPA sebesar 2,67 masih berada di bawah target 3,00. Karena penanggung jawab belum mencantumkan kendala dan rencana aksi pada MOTOR KINETIS, proyeksi peningkatan IPA belum dapat ditentukan secara spesifik. Tahap awal yang diperlukan adalah pemeriksaan komponen penilaian, pelengkapan informasi kendala, dan penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi.

Peluang peningkatan nilai akhir tahun pada seluruh indikator tersebut perlu ditentukan berdasarkan perkembangan kegiatan, sisa waktu pelaksanaan, data pendukung, dan ketentuan yang berlaku. Tanpa pemeriksaan tersebut, besarnya peningkatan yang dapat dicapai belum dapat dipastikan.

5. Matriks Proyeksi dan Arah Pengendalian Triwulan IV

Indikator	Kondisi Triwulan III	Arah pengendalian Triwulan IV	Fokus evaluasi akhir tahun
Penyelesaian perkara tepat waktu	83,33%; target 91%	Menelaah variasi capaian, memeriksa data perkara, dan memantau perkembangan penanganan.	Realisasi akhir tahun dan konsistensi penyelesaian perkara.
Salinan putusan tepat waktu	100%	Mempertahankan ketertiban administrasi dan bukti pengiriman.	Konsistensi realisasi dan validitas data.
Pemberitahuan petikan/amar putusan	100%	Mempertahankan ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan bukti.	Ketepatan administrasi dan kelengkapan bukti.
Putusan pada Direktori Putusan	100%	Mempertahankan kesesuaian data dan kelengkapan publikasi.	Kesesuaian putusan yang diminutasi dan diunggah.
Penyelesaian permohonan eksekusi	100% pada Agustus; tidak ada permohonan	Memantau setiap permohonan yang masuk dan status penyelesaiannya.	Realisasi berdasarkan permohonan yang menjadi

	pada Juli dan September		objek pengukuran.
Penggunaan e-Court	100%	Mempertahankan pemanfaatan dan validasi data.	Konsistensi penggunaan e-Court.
Kepuasan pengguna layanan	99,09; target 98,00	Mempertahankan standar pelayanan, mengklarifikasi data survei, dan menindaklanjuti rekomendasi.	Hasil pengukuran berikutnya, konsistensi data, dan tindak lanjut pelayanan.
IP ASN	83,02; target 81,00	Memelihara kualitas data dan profesionalitas aparatur.	Validitas data dan capaian akhir tahun.
IKPA DIPA-01	98,53; target 96,00	Mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran dan memantau deviasi perencanaan.	Nilai akhir IKPA dan komponen penilaiannya.
IKPA DIPA-05	89,29; target 95,00	Memantau revisi anggaran, menyesuaikan rencana penarikan dana, dan mempercepat realisasi yang memungkinkan.	Perkembangan nilai IKPA dan efektivitas tindak lanjut.
NKPA DIPA-01	81,25; target 96,00	Memantau RO yang masih berlangsung dan memperbarui data realisasi.	Perubahan nilai berdasarkan data pengukuran terbaru.
NKPA DIPA-05	41,19; target 91,00	Mempercepat administrasi dan pertanggungjawaban, memperbarui volume fisik, dan menelaah komponen efisiensi SBK.	Perkembangan CRO, komponen efisiensi SBK, dan capaian akhir tahun.
IPA	2,67; target 3,00	Memeriksa komponen penilaian, meminta pelengkapan kendala dan rencana aksi, serta memantau tindak lanjut.	Nilai IPA akhir tahun dan bukti perbaikan.

6. Kesimpulan Proyeksi Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III, pencapaian target kinerja sampai dengan akhir Tahun 2026 memerlukan fokus pengendalian yang berbeda untuk setiap kelompok indikator. Indikator yang telah memenuhi atau melampaui target perlu dipertahankan melalui pemantauan rutin dan pengendalian kualitas data. Indikator yang belum mencapai target perlu memperoleh prioritas perbaikan berdasarkan kesenjangan capaian, karakteristik pengukuran, komponen pembentuk nilai, dan peluang perbaikan yang masih tersedia.

Secara khusus, NKPA DIPA-05, NKPA DIPA-01, dan IKPA DIPA-05 memerlukan perhatian pada Triwulan IV, disertai pengendalian terhadap penyelesaian perkara tepat waktu dan pengelolaan aset. Pada indikator IPA, kelengkapan dokumentasi kendala dan rencana aksi perlu menjadi bagian dari tindak lanjut. Pada indikator kepuasan pengguna layanan, konsistensi data survei dan dokumentasi tindak lanjut rekomendasi perlu diperjelas.

MOTOR KINETIS memberikan manfaat dalam mendukung pengumpulan data, penyampaian kendala, pencatatan rencana aksi, dan pengunggahan eviden oleh unit pengampu. Informasi tersebut dapat membantu pimpinan mengidentifikasi indikator yang memerlukan perhatian dan menelusuri tindakan perbaikan yang direncanakan. Namun, aplikasi ini akan memberikan manfaat pengendalian yang lebih optimal apabila seluruh unit mengisi informasi secara lengkap, memperbarui data sesuai kondisi aktual, dan melengkapi rencana aksi dengan bukti pelaksanaan yang relevan.

Dengan demikian, proyeksi capaian kinerja akhir tahun harus terus diperbarui berdasarkan realisasi aktual dan hasil evaluasi tindak lanjut. Pendekatan ini diharapkan membantu pimpinan menetapkan prioritas, mengarahkan sumber daya, serta memastikan bahwa upaya perbaikan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan III Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja satuan kerja menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah indikator telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sedangkan indikator lainnya masih memerlukan penguatan pengendalian dan tindak lanjut perbaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Pada bidang kepaniteraan, sebagian besar indikator pelayanan administrasi perkara telah mencapai realisasi 100%, meliputi penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu, pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan, publikasi putusan pada Direktori Putusan, serta penggunaan e-Court. Namun, indikator penyelesaian perkara secara tepat waktu masih berada di bawah target, dengan rata-rata realisasi sebesar 83,33% dari target 91%. Penjelasan unit pengampu yang tercatat dalam aplikasi MOTOR KINETIS memberikan konteks mengenai tahapan penanganan perkara yang menjadi perhatian evaluasi. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data pengukuran dan pemantauan perkembangan perkara secara berkala, dengan tetap memperhatikan kewenangan majelis hakim.

Pada aspek kepuasan dan kepercayaan publik, indikator kepuasan pengguna layanan pengadilan mencatat realisasi sebesar 99,09 dari target 98,00, dengan capaian terhadap target sebesar 101,11%. Realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,60 dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 99,57 sebagaimana tercantum dalam dashboard MOTOR KINETIS. Eviden survei yang diunggah menunjukkan penilaian positif terhadap kualitas pelayanan dan persepsi antikorupsi. Meskipun demikian, konsistensi angka IKM antara dashboard dan laporan survei masih perlu diklarifikasi, sedangkan tindak lanjut rekomendasi survei perlu didokumentasikan secara lebih jelas sebagai bagian dari perbaikan pelayanan berkelanjutan.

Pada bidang kesekretariatan, indikator IP ASN mencapai 83,02 dari target 81,00 dan IKPA DIPA-01 mencapai 98,53 dari target 96,00. Kedua indikator tersebut telah melampaui target. Sementara itu, IKPA DIPA-05 mencapai 89,29 dari target 95,00,

NKPA DIPA-01 mencapai 81,25 dari target 96,00, NKPA DIPA-05 mencapai 41,19 dari target 91,00, dan Indikator Pengelolaan Aset (IPA) mencapai 2,67 dari target 3,00.

Hasil evaluasi terhadap IKPA DIPA-05 menunjukkan perlunya penguatan kesesuaian antara rencana penarikan dana dan realisasi pelaksanaan anggaran. Unit pengampu telah menyampaikan langkah korektif berupa pengajuan revisi pengurangan anggaran terhadap sisa pagu kegiatan yang diperkirakan sulit direalisasikan, khususnya anggaran sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan. Adapun pada NKPA DIPA-01, capaian Rincian Output (RO) sebesar 75,00 berkaitan dengan masih adanya RO yang pelaksanaannya berlangsung secara bertahap, antara lain RO Layanan Operasional Kantor. Pengendalian perlu diarahkan pada pemantauan penyelesaian RO dan pemutakhiran data realisasi.

Pada NKPA DIPA-05, nilai realisasi masih jauh di bawah target. Berdasarkan data terbaru pada MOTOR KINETIS, komponen capaian Rincian Output (CRO) tercatat sebesar 41,58, penggunaan SBK sebesar 100,00, dan efisiensi SBK sebesar 0,00. Penjelasan unit pengampu menunjukkan bahwa karakteristik sebagian RO yang berlangsung berkala sepanjang tahun dan bersifat *demand-driven*, serta pola pelaporan volume output setelah tahapan kegiatan selesai, menjadi konteks dalam mengevaluasi capaian tersebut. Tindak lanjut diarahkan pada percepatan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan, pemutakhiran data realisasi volume fisik, serta penelaahan komponen efisiensi SBK berdasarkan mekanisme penghitungan yang berlaku.

Sementara itu, IPA masih berada di bawah target dan penanggung jawab indikator belum mencantumkan keterangan kendala maupun rencana aksi pada MOTOR KINETIS. Oleh karena itu, penyebab belum optimalnya capaian IPA belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi komponen yang memengaruhi nilai indikator serta menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi faktual.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Triwulan III juga menunjukkan manfaat penerapan MOTOR KINETIS sebagai sarana pengumpulan data capaian, dokumentasi kendala, pencatatan rencana aksi, dan pengunggahan eviden pendukung oleh unit pengampu. Keberadaan aplikasi ini membantu menghubungkan capaian kuantitatif dengan penjelasan operasional, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih terarah. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada ketepatan data,

konsistensi pembaruan, kelengkapan eviden, serta kedisiplinan setiap penanggung jawab dalam mengisi dan menindaklanjuti informasi pada aplikasi.

Dengan demikian, hasil monitoring Triwulan III Tahun 2026 memberikan gambaran mengenai capaian yang perlu dipertahankan, kesenjangan yang harus diperbaiki, dan aspek tata kelola monitoring yang masih perlu diperkuat. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengendalian dan pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV agar pencapaian target kinerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 dapat diupayakan secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2026, rekomendasi tindak lanjut bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Pengendalian Kinerja Kepaniteraan

Unit terkait perlu mempertahankan capaian indikator pelayanan administrasi perkara yang telah mencapai target, khususnya ketepatan waktu pengiriman salinan putusan, pemberitahuan petikan atau amar putusan, publikasi putusan pada Direktori Putusan, dan penggunaan e-Court. Pemeliharaan capaian tersebut perlu disertai validasi data dan kelengkapan bukti administrasi.

Terhadap indikator penyelesaian perkara tepat waktu yang belum mencapai target, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap data perkara yang menjadi dasar penghitungan, termasuk penelaahan atas penjelasan kendala yang telah disampaikan melalui MOTOR KINETIS. Pemantauan perkembangan perkara perlu dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap menghormati independensi dan kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

2. Pemeliharaan Kualitas Pelayanan dan Penguatan Tindak Lanjut Survei

Capaian indikator kepuasan pengguna layanan yang telah melampaui target perlu dipertahankan melalui konsistensi penerapan standar pelayanan, pemeliharaan integritas aparatur, dan peningkatan kualitas sarana serta prasarana sesuai hasil evaluasi.

Penanggung jawab indikator perlu mengklarifikasi perbedaan angka IKM yang tercantum pada dashboard MOTOR KINETIS dan laporan survei agar dasar penghitungan yang digunakan dalam pelaporan konsisten. Selain itu, rekomendasi

hasil survei perlu ditindaklanjuti dan didokumentasikan secara lebih jelas, termasuk tindakan yang telah dilakukan, tindakan yang masih direncanakan, serta bukti pendukung yang relevan.

3. Perbaikan Pelaksanaan Anggaran DIPA-05

Pengendalian IKPA DIPA-05 perlu diarahkan pada peningkatan kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran serta pemantauan komponen yang belum optimal. Pengajuan revisi pengurangan anggaran terhadap sisa pagu kegiatan yang diperkirakan sulit direalisasikan perlu dipantau penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Unit terkait juga perlu mengoptimalkan realisasi anggaran yang masih memungkinkan dilaksanakan, memperbarui rencana penarikan dana berdasarkan kebutuhan aktual, dan memantau perkembangan nilai komponen IKPA secara berkala. Setiap tindakan korektif perlu didokumentasikan agar dampaknya terhadap capaian indikator dapat dievaluasi.

4. Penguatan Pengendalian NKPA DIPA-01 dan DIPA-05

Pada NKPA DIPA-01, pengendalian perlu difokuskan pada pemantauan penyelesaian RO yang masih berlangsung secara bertahap, khususnya RO Layanan Operasional Kantor, serta pemutakhiran data realisasi sesuai perkembangan pelaksanaan kegiatan. Komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK yang telah mencapai nilai 100,00 perlu dipertahankan.

Pada NKPA DIPA-05, perlu dilakukan percepatan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah terlaksana serta pemutakhiran realisasi volume fisik secara berkala melalui aplikasi Monev DJA/SMART. Selain itu, komponen CRO dan efisiensi SBK perlu ditelaah berdasarkan data pendukung serta mekanisme penghitungan yang berlaku. Perbaikan harus didasarkan pada perkembangan pelaksanaan yang sebenarnya dan tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan angka capaian.

5. Pelengkapan Evaluasi dan Rencana Aksi Indikator Pengelolaan Aset

Penanggung jawab IPA perlu melakukan evaluasi terhadap komponen penilaian yang belum mencapai nilai maksimal dan melengkapi keterangan kendala serta rencana aksi pada MOTOR KINETIS. Evaluasi tersebut perlu didukung oleh data penatausahaan BMN, dokumen pengelolaan aset, dan bukti lain yang relevan.

Rencana aksi hendaknya disusun berdasarkan hasil pemeriksaan faktual, memuat langkah perbaikan yang jelas, dan dapat dipantau pelaksanaannya. Sampai dengan tersedianya hasil evaluasi tersebut, penyebab belum optimalnya capaian IPA tidak boleh disimpulkan tanpa dukungan data.

6. Penguatan Pemanfaatan MOTOR KINETIS

MOTOR KINETIS perlu terus dimanfaatkan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja yang menghubungkan data capaian, kendala, rencana aksi, dan eviden pendukung. Setiap unit pengampu perlu memastikan bahwa informasi yang dicatat pada aplikasi sesuai dengan data sumber dan diperbarui secara berkala.

Pimpinan dan pengelola monitoring perlu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian kendala dan rencana aksi, konsistensi angka dengan dokumen pendukung, serta perkembangan pelaksanaan tindak lanjut. Apabila terdapat indikator yang belum dilengkapi penjelasan kendala atau rencana aksinya, unit pengampu perlu diminta melakukan evaluasi dan melengkapi dokumentasi tersebut.

Selain itu, hasil monitoring melalui MOTOR KINETIS perlu digunakan sebagai bahan pembahasan evaluasi berkala agar aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

7. Penguatan Pemantauan dan Pelaporan Triwulan IV

Seluruh unit penanggung jawab indikator perlu melaksanakan rencana aksi sesuai tugas dan kewenangannya, memantau perkembangan capaian secara berkala, serta melengkapi bukti pelaksanaan tindak lanjut. Prioritas pengendalian perlu diberikan kepada indikator yang masih memiliki kesenjangan terhadap target, tanpa mengabaikan upaya mempertahankan indikator yang telah mencapai atau melampaui target.

Hasil pelaksanaan tindak lanjut perlu dievaluasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan, sepanjang data pembanding tersedia. Apabila target belum dapat dicapai, unit terkait perlu menyampaikan penjelasan berdasarkan kondisi faktual dan mengidentifikasi langkah lanjutan yang masih memungkinkan dilakukan sesuai ketentuan.

Melalui langkah tersebut, hasil monitoring Triwulan III dapat digunakan secara optimal sebagai dasar pengendalian pada Triwulan IV dan penyusunan evaluasi kinerja akhir Tahun Anggaran 2026.

Sebagai penutup, laporan monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi bahan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mempertahankan capaian yang telah baik, menindaklanjuti kesenjangan kinerja, dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan tugas. Dengan dukungan data yang valid, dokumentasi yang lengkap, serta pelaksanaan rencana aksi yang terukur melalui MOTOR KINETIS, upaya peningkatan kinerja diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LAMPIRAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
LAPORAN CAPAIAN KINERJA (SAKIP)

Periode: **BULAN JULI 2026**

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern							
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	**91.00**	6,00	6,00	**100.00**	**109.89%**	Tercapai
2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	**100.00**	6,00	6,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	**100.00**	2,00	2,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	**100.00**	6,00	6,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	**90.00**	0,00	0,00	**0.00**	**0.00%**	
6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	**100.00**	12,00	12,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.							
7	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	**98.00**	IKM 0 Laporan Survei	IPAK 0	**0.00**	**0.00%**	Per Triwulan

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
			DOK SUMBER: BELUM DIUNGGAH				

Serang, 27 Oktober 2026

Panitera,

ASWIRMAN, S.H., M.H.

NIP. 19720715 199203 1 003

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
LAPORAN CAPAIAN KINERJA (SAKIP)

Periode: **BULAN AGUSTUS 2026**

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern							
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	**91.00**	2,00	1,00	**50.00**	**54.95%**	**Kendala:** Bahwa Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN-SRG telah diserahkan kepada kami untuk memeriksa dan memutus sejak tanggal 26 Februari 2026 sesuai dengan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 10/PEN-MH/2026/PTUN-SRG menjelaskan bahwa perkara tersebut sudah diperiksa lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan: a. Pemegang Hak yang tercantum dalam objek sengketa yaitu atas nama pemerintah republik indonesia Cq. Kementrian pertahanan Republik indonesia telah 3 (tiga) kali dipanggil melalui Surat panggilan pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 04 Maret 2026, Maret 2026,11 Maret 2026 dan 01 April 2026; 'b. Bahwa pemegang hak yang tercantum dalam Objek

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
							Sengketa tanah tersebut mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo melalui kuasa hukumnya tertanggal 14 April 2026 yang diserahkan melaui PTSP PTUN Serang oleh kuasanya pada tanggal 15 April 2026 pada saat pemeriksaan telah sampai pada waktu tahap persidangan terbuka untuk umum yang telah di jadwalkan yaitu jawaban Tergugat, serta telah ditetapkan sebagai pihak tergugat II Intervensi melalui penepatan Nomor:10/G/2026/PTUN-SRG tanggal 29 April 2026 sehingga kami Majelis Hakim harus mengulang tahapan jawab jinawab untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Para Pihak; c. Pada saat agenda sidang Pemeriksaan Pembuktian,Para pihak menyatakan berkeinginan mengajukan Saksi dan/atau Ahli setelah Pemeriksaan Setempat terhadap Pemeriksaan Setempat, pihak tergugat beberapa kali menyatakan ingin

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
							mengajukan Pemeriksaan Setempat, pihak tergugat beberapa kali ingin mengajukan Pemeriksaan Setempat,namun pada akhirnya menyatakan tidak jadi mengajukan hingga akhirnya Pemerisaan setempat terlaksana Tanggal 30 Juni 2026 dengan adanya permohonan dari para Penggugat, dengan demikian agenda pembuktian dilaksanakan dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) kali persidangan termmaksuk pemeriksaan setempat, oleh karena para pihak membutuhkan waktu untuk melengkapi alat bukti masing-masing termasuk pemenuhan beban pembuktian dari Majleis Hakim; d.Pada saat Persidangan dengan agenda Pembuktian terahir dari Para Pihak, Para pihak menyatakan membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk melakukan inzaghe berkas da menyusur sehingga secara bija memberik seminggu

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
							pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. **Rencana Aksi:** Kewenangan Majelis Hakim
2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	**100.00**	2,00	2,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	**100.00**	5,00	5,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	**100.00**	2,00	2,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	**90.00**	1,00	1,00	**100.00**	**111.11%** (Over Target)	Anomali (>110%)
6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	**100.00**	7,00	7,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.							
7	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	**98.00**	IKM 0 Laporan Survei DOK SUMBER: BELUM DIUNGGAH	IPAK 0	**0.00**	**0.00%**	Per Triwulan

Serang, 27 Oktober 2026

Panitera,



ASWIRMAN, S.H., M.H.

NIP. 19720715 199203 1 003

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (SAKIP)

Periode: **BULAN SEPTEMBER 2026**

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern							
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	**91.00**	3,00	3,00	**100.00**	**109.89%**	Tercapai
2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	**100.00**	3,00	3,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	**100.00**	12,00	12,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	**100.00**	3,00	3,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	**90.00**	0,00	0,00	**0.00**	**0.00%**	**Kendala:** Tidak ada permohonan pengawasan eksekusi pada Bulan September 2026 **Rencana Aksi: -**
6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	**100.00**	6,00	6,00	**100.00**	**100.00%**	Tercapai
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.							
7	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	**98.00**	IKM 98,60 Laporan Survei DOK SUMBER: 1791431302_613b591b7dfb48b52bbd.pdf	IPAK 99,57	**99.09**	**101.11%**	Tercapai

Serang, 27 Oktober 2026

Panitera,

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

ASWIRMAN, S.H., M.H.

NIP. 19720715 199203 1 003

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
LAPORAN CAPAIAN KINERJA (SAKIP)

Periode: **BULAN SEPTEMBER 2026**

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
1	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	**81.00**	Aplikasi SIKEP DOK SUMBER: 1791432415_2601db9bf7f4599510d0.pdf	83,02	**83.02**	**102.49%**	Tercapai
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	**96.00**	Aplikasi MyIntress DIPA 01 DOK SUMBER: 1791948267_c96310d89f91e4222a1f.png	98,53	**98.53**	**102.64%**	Tercapai
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	**95.00**	Aplikasi MyIntress DIPA 05 DOK SUMBER: 1791948003_269f4e2542ad50b09021.png	80,37	**89.30**	**94.00%**	**Kendala:** Nilai IKPA DIPA-05 sampai dengan September 2026 tercatat sebesar 89,29, masih di bawah target 95,00. Komponen yang memerlukan perhatian meliputi deviasi halaman III DIPA yang memperoleh nilai 71,70 dan penyerapan anggaran dengan nilai 80,72. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran serta

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
							optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan. **Rencana Aksi:** Telah dilakukan langkah korektif melalui pengajuan revisi pengurangan anggaran terhadap sisa pagu kegiatan yang diperkirakan sulit direalisasikan, khususnya anggaran sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan. Langkah ini bertujuan menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan kemampuan realisasi satuan kerja, serta meningkatkan kesesuaian rencana penarikan dana dengan kondisi pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, dilakukan pemantauan terhadap proses revisi, penyesuaian rencana penarikan dana, dan percepatan realisasi anggaran yang masih dapat dilaksanakan pada Triwulan IV sesuai ketentuan yang berlaku

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	**96.00**	Aplikasi SMART Monev DIPA 01 DOK SUMBER: 1791968076_3bacd45f297775191a1b.png	81,25	**81.25**	**84.64%**	**Kendala:** Nilai NKPA DIPA-01 sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 81,25, masih di bawah target tahunan sebesar 96,00. Capaian RO sebesar 75,00 terutama dipengaruhi oleh masih adanya Rincian Output (RO) yang pelaksanaannya berlangsung secara bertahap (on progress), antara lain RO Layanan Operasional Kantor yang memiliki volume target sebanyak 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran capaian RO tersebut dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan secara proporsional terhadap periode pelaksanaan, sehingga pada Triwulan III capaian belum mencapai 100,00. Sementara itu, komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK masing-masing telah mencapai 100,00, yang menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut telah tercapai secara optimal. **Rencana Aksi:** Melakukan monitoring secara berkala

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
							terhadap pelaksanaan RO yang masih berlangsung (on progress), khususnya RO Layanan Operasional Kantor, untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan dan pemenuhan target dapat diselesaikan sesuai rencana hingga akhir Tahun Anggaran 2026. Selain itu, memastikan kelengkapan dan pemutakhiran data realisasi RO sesuai dengan progres pelaksanaan yang sebenarnya serta mempertahankan capaian optimal pada komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, diharapkan seluruh RO dapat mencapai target pada akhir tahun anggaran sehingga nilai NKPA DIPA-01 meningkat sesuai sasaran yang ditetapkan.
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	**91.00**	Aplikasi SMART Monev DIPA 05 DOK SUMBER: 1791968414_97d80c01baa758231ce2.png	41,19	**41.19**	**45.26%**	**Kendala:** 1) Nilai Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 41,58% belum optimal karena sebagian besar rincian output memiliki karakteristik

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
							pelaksanaan kegiatan yang berjalan secara berkala sepanjang tahun dan bersifat demand-driven. 2) Pelaporan realisasi volume riil (RVRO) secara penuh baru dapat direkam pada akhir Triwulan IV setelah seluruh tahapan kegiatan operasional tahun berjalan tuntas dilaksanakan. **Rencana Aksi:** 1) Mempercepat penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah terlaksana agar target volume output dapat segera diinput penuh pada akhir tahun anggaran. 2) Memantau dan melakukan pemutakhiran data realisasi volume fisik secara berkala pada aplikasi Monev DJA/SMART guna mendongkrak akumulasi nilai CRO Satker secara optimal pada penutupan tahun anggaran.
6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	**3.00**	Aplikasi e-SADEWA DOK SUMBER: 1792545273_3cbaff8302160de7a70f.jpeg	2,67	**2.67**	**89.00%**	**Kendala:** tes kendala **Rencana Aksi:** tes aksi

Serang, 27 Oktober 2026

Sekretaris,



TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.

NIP. 19780905 200604 1 002

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
LAPORAN CAPAIAN KINERJA (SAKIP)

Periode: **BULAN JULI 2026**

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
1	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	**81.00**	Aplikasi SIKEP DOK SUMBER: 1792472569_e80dba04c12f4a028046.png	83,02	**83.02**	**102.49%**	Per Triwulan
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	**96.00**	Aplikasi MyIntress DIPA 01 DOK SUMBER: 1791430713_2303ada6b9e6139e0e49.png	99,84	**99.84**	**104.00%**	Per Triwulan
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	**95.00**	Aplikasi MyIntress DIPA 05 DOK SUMBER: 1791430409_61e263abbac38822004f.png	71,98	**79.98**	**84.19%**	Per Triwulan
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	**96.00**	Aplikasi SMART Monev DIPA 01 DOK SUMBER: 1792570478_ec104cc38b06e2a35a83.png	81,25	**81.25**	**84.64%**	Per Triwulan
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	**91.00**	Aplikasi SMART Monev DIPA 05 DOK SUMBER: 1792570144_b23bc4fb6cdeae45f85e.png	41,19	**41.19**	**45.26%**	Per Triwulan
6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	**3.00**	Aplikasi e-SADEWA	2,67	**2.67**	**89.00%**	Per Triwulan

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
	Satuan Kerja Pengadilan		DOK SUMBER: 1790733952_270473e956c744870078.jpeg				

Serang, 27 Oktober 2026

Sekretaris,

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.

NIP. 19780905 200604 1 002

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
LAPORAN CAPAIAN KINERJA (SAKIP)

Periode: **BULAN AGUSTUS 2026**

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
1	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	**81.00**	Aplikasi SIKEP DOK SUMBER: 1791430330_dce62d7f3fdfcee5b0fa.png	83,02	**83.02**	**102.49%**	Per Triwulan
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	**96.00**	Aplikasi MyIntress DIPA 01 DOK SUMBER: 1790323741_13a8e6e9886705315c82.pdf	100,00	**100.00**	**104.17%**	Per Triwulan
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	**95.00**	Aplikasi MyIntress DIPA 05 DOK SUMBER: 1791429817_c5ff42299ce297567a09.png	79,79	**88.66**	**93.33%**	Per Triwulan
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	**96.00**	Aplikasi SMART Monev DIPA 01 DOK SUMBER: 1791429913_d9d4a72e6d917a876d42.png	81,25	**81.25**	**84.64%**	Per Triwulan
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	**91.00**	Aplikasi SMART Monev DIPA 05 DOK SUMBER: 1791429955_651c895ef83edd5651ac.png	41,19	**41.19**	**45.26%**	Per Triwulan
6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	**3.00**	Aplikasi e-SADEWA	2,67	**2.67**	**89.00%**	Per Triwulan

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
	Satuan Kerja Pengadilan		DOK SUMBER: 1790733983_f98daccf97803e399d57.jpeg				

Serang, 27 Oktober 2026

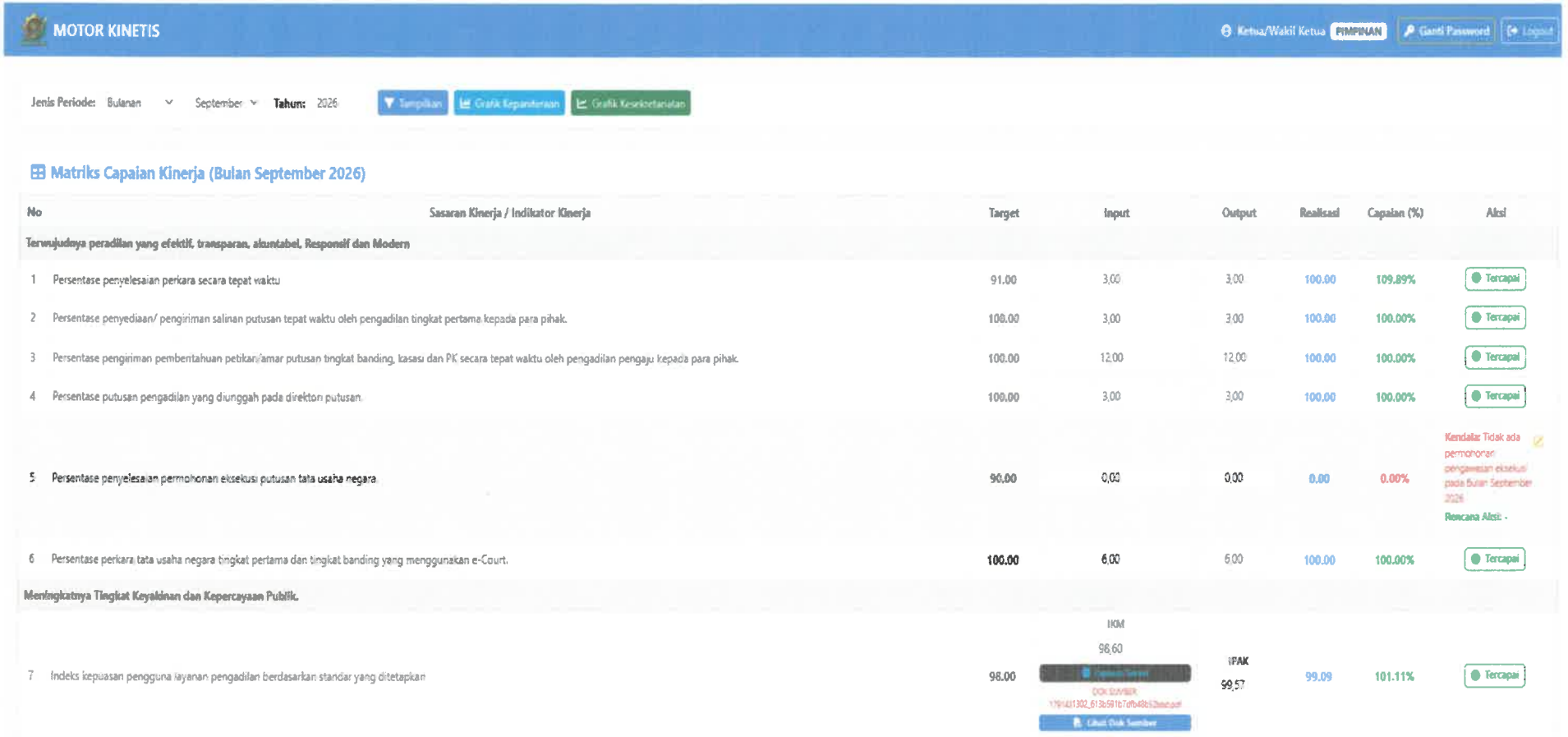
Sekretaris,

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.

NIP. 19780905 200604 1 002

SCREENCAPTURE APLIKASI DASHBOARD KINERJA MOTOR KINETIS



MOTOR KINETIS

Ketua/Wakil Ketua PIMPINAN | Ganti Password | Logout

Jenis Periode: Bulanan | September | Tahun: 2026 | Tampilkan | Grafik Kepatuhan | Grafik Kesesuaian

Matriks Capaian Kinerja (Bulan September 2026)

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Aksi
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern							
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91.00	3,00	3,00	100.00	109.89%	Tercapai
2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100.00	3,00	3,00	100.00	100.00%	Tercapai
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100.00	12,00	12,00	100.00	100.00%	Tercapai
4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100.00	3,00	3,00	100.00	100.00%	Tercapai
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90.00	0,00	0,00	0.00	0.00%	Kendala: Tidak ada permohonan pengawasan eksekusi pada Bulan September 2026 Rencana Aksi: -
6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100.00	6,00	6,00	100.00	100.00%	Tercapai
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.							
7	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98.00	IKM 98,60	IPAK 99,57	99.09	101.11%	Tercapai

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

8	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81.00	Aplikasi SAKIP DOK SUMBER: 1791432415_2901ddd9ef7f45995 10d0.pdf Lihat Eviden Dok Sumber	83.02	83.02	102.49%	Tercapai	
9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96.00	Aplikasi Monitoring DIPA 05 DOK SUMBER: 1791846267_d63 10d9f9f1e4222a1f.png Lihat Eviden Dok Sumber	98.53	98.53	102.64%	Tercapai	
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	95.00	Aplikasi Monitoring DIPA 05 DOK SUMBER: 1791848005_2f8f4e2542ad03b09221.png Lihat Eviden Dok Sumber	80.37	89.30	94.00%		**Kendala:** Nilai IKPA DIPA-05 sampai dengan September 2026 tercatat sebesar 89,29, masih di bawah target 95,00. Komponen yang memerlukan perhatian meliputi deviasi halaman III DIPA yang memperoleh nilai 71,70 dan penyerapan anggaran dengan nilai 80,72. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran serta optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan. **Rencana Aksi:** Telah dilakukan langkah korektif melalui pengajuan revisi pengurangan anggaran terhadap sisa pagu kegiatan yang diperkirakan sulit direalisasikan, khususnya anggaran sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan. Langkah ini bertujuan menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan kemampuan realisasi satuan kerja, serta

11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	**96.00**	Aplikasi SMART Monev DIPA III DOK SUMBER: Lihat Eviden Dok Sumber	81,25	1.25	**84.64%**	**Kendala:** Nilai NKPA DIPA-01 sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 81,25, masih di bawah target tahunan sebesar 96,00. Capaian RO sebesar 75,00 terutama dipengaruhi oleh masih adanya Rincian Output (RO) yang pelaksanaannya berlangsung secara bertahap (on progress), antara lain RO Layanan Operasional Kantor yang memiliki volume target sebanyak 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran capaian RO tersebut dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan secara proporsional terhadap periode pelaksanaan, sehingga pada Triwulan III capaian belum mencapai 100,00. Sementara itu, komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK masing-masing telah mencapai 100,00, yang menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut telah tercapai secara optimal. **Rencana Aksi:** Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan RO yang masih berlangsung (on progress), khususnya RO Layanan Operasional Kantor, untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan dan pemenuhan target dapat diselesaikan sesuai rencana hingga akhir Tahun Anggaran 2026. Selain itu, memastikan kelengkapan dan pemutakhiran data realisasi RO sesuai dengan progres

12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	91.00	Aplikasi SMART Monev DIPA 05 DOK SUMBER: 1791988414_97d80c01baa7385231ca2.png Lihat Eviden Dok Sumber	41.19	41.19	45.26%	**Kendala:** 1) Nilai Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 41,58% belum optimal karena sebagian besar rincian output memiliki karakteristik pelaksanaan kegiatan yang berjalan secara berkala sepanjang tahun dan bersifat demand-driven. 2) Pelaporan realisasi volume riil (RVRO) secara penuh baru dapat direkam pada akhir Triwulan IV setelah seluruh tahapan kegiatan operasional tahun berjalan tuntas dilaksanakan. **Rencana Aksi:** 1) Mempercepat penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah terlaksana agar target volume output dapat segera diinput penuh pada akhir tahun anggaran. 2) Memantau dan melakukan pemutakhiran data realisasi volume fisik secara berkala pada aplikasi Monev DJA/SMART guna mendongkrak akumulasi nilai CRO Satker secara optimal pada penutupan tahun anggaran.
13	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	Aplikasi e-SAKTI PN DOK SUMBER: 1782545171_3cee4f1d2180de7a7f.jpeg Lihat Eviden Dok Sumber	2,67	2.67	89.00%	**Kendala:** tes kendala **Rencana Aksi:** tes aks

Cetak / Export PDF | Setujui & Tanda Tangan Laporan

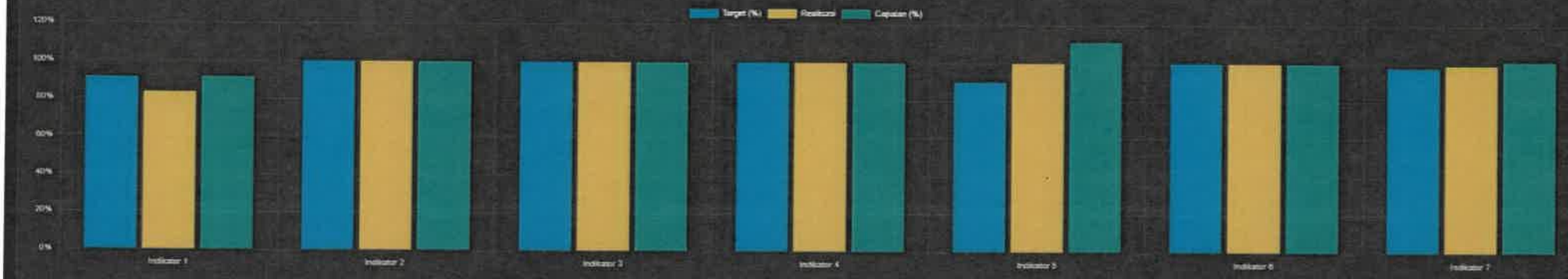
Grafik Capaian Kinerja Kepaniteraan

Triwulanan | Triwulan III (Jul - Sep) | 2026 | Tampilkan

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 1 (6 INDIKATOR AKTIF)

100.45%

Tercapai Optimal



Daftar 7 Indikator Kepaniteraan

Kode	Nama Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indikator 1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91.00%	83.33	91.58%
Indikator 2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100.00%	100.00	100.00%
Indikator 3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100.00%	100.00	100.00%
Indikator 4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100.00%	100.00	100.00%
Indikator 5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	90.00%	100.00	111.11%
Indikator 6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100.00%	100.00	100.00%
	▶ RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 1 (6 INDIKATOR AKTIF) :			100.45%
Indikator 7	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98.00%	99.09	101.11%

← Kembali

Grafik Capaian Kinerja Kesekretariatan

Triwulanan

Triwulan III (Jul - Sep) | 2026 | Tampilkan

RATA-RATA CAPAIAN (6 INDIKATOR AKTIF)

85.92%

Perlu Evaluasi



Daftar Indikator Kesekretariatan

Kode	Nama Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
[redacted]	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81.00%	83.02	102.49%
[redacted]	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96.00%	99.46	103.60%
[redacted]	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	95.00%	85.98	90.51%
[redacted]	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	96.00%	81.25	84.64%
[redacted]	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	91.00%	41.19	45.26%
[redacted]	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	2.67	89.00%
	▶ RATA-RATA CAPAIAN KESEKRETARIATAN (6 INDIKATOR AKTIF) :			85.92%